



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS KOPERASI UKM
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

RENCANA KERJA 2026

Jl. Tengah Desa Toto Selatan
Kec. Kabila - Kab. Bone Bolango

www.diskumperindag.gorontaloprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2026 ini dapat diselesaikan

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026, RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026 ini menjadi dasar penyusunan dengan tetap mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RPJMD 2025-2029 Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. menyatakan bahwa tujuan daerah melaksanakan pembangunan adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing pemerintah daerah. Selanjutnya sesuai dengan pasal 260 UU 23 Tahun 2014 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat dengan RKPD.

Pada tahun 2026 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo melaksanakan 11 Program, 18 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yaitu program/kegiatan di Bidang Koperasi, Bidang UKM, Bidang Industri, Bidang Perdagangan, UPTD BPSMB dan Kesekretariatan. Pelaksanaan program dan kegiatan akan sangat tergantung pada komitmen kerja dan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal yang dibangun yang berdasar pada peraturan yang berlaku.



Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2026. Semoga pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2025 berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Gorontalo, Agustus 2025

KEPALA DINAS

RISION SUNGE

Pembina Utama Madya

NIP. 196909241989021001



DAFTAR ISI

<i>Uraian</i>	<i>Hal</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.....	12
dan Capaian Renstra SKPD	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kumperindag	85
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	90
Perangkat Daerah	
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	99
Provinsi Gorontalo Tahun 2025	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	108
Bab III Tujuan Sasaran Perangkat Daerah	114
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	114
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	119
3.3. Program dan Kegiatan.....	119
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	132
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kumperindag	132
Provinsi Gorontalo Tahun 2026	
Bab V Penutup.....	142



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Program dan Kegiatan beserta Realisasi Keuangan	12
	Tahun 2024	
Tabel 2.2.	Indikator Sasaran Diskumperindag Prov. Gorontalo	16
	Tahun 2024	
Tabel 2.3.	Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024.....	18
	Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	
Tabel 2.4.	Perkembangan Kinerja Koperasi 2021-2024.....	29
Tabel 2.5.	Data Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Primer	31
	Provinsi Gorontalo Tahun 2024	
Tabel 2.6.	Data Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2022-2024	39
Tabel 2.7.	Perkembangan IKM Kabupaten/Kota. Tahun 2020 – 2024.....	41
Tabel 2.8.	Rekap Realisasi Eksport Berdasarkan Komoditi.....	46
	Selang Bulan Januari – Desember 2024	
T-C. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD	72
	dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
	Provinsi Gorontalo	
Tabel 2.9.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kumperindag Tahun	86
	2024 Provinsi Gorontalo	
T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Koperasi UKM.....	89
	Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	
T-C.31	Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025.....	101
Tabel 2.10.	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026	105
T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku	109
	Kepentingan Tahun 2025. Dinas Kumperindag Provinsi	
	Gorontalo	
Tabel 3.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas	119
	Kumperindag Provinsi Gorontalo 2023-2026	
Tabel 3.2.	Perbandingan Jumlah Program Kegiatan dan Anggaran	121
Tabel 3.3.	Perbandingan Program Kegiatan dan Anggaran RKPD &	122
	Renja 2025	
T-C. 33	Rumusan Rencana Program SKPD Tahun 2025 dan	123
	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD 2026	
	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
	Provinsi Gorontalo	
Tabel 4.1.	Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah	133
	(RENJA OPD)	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Hubungan antara Dokumen Perencanaan		2
---	-------	---

BAB I

PENDAHULUAN

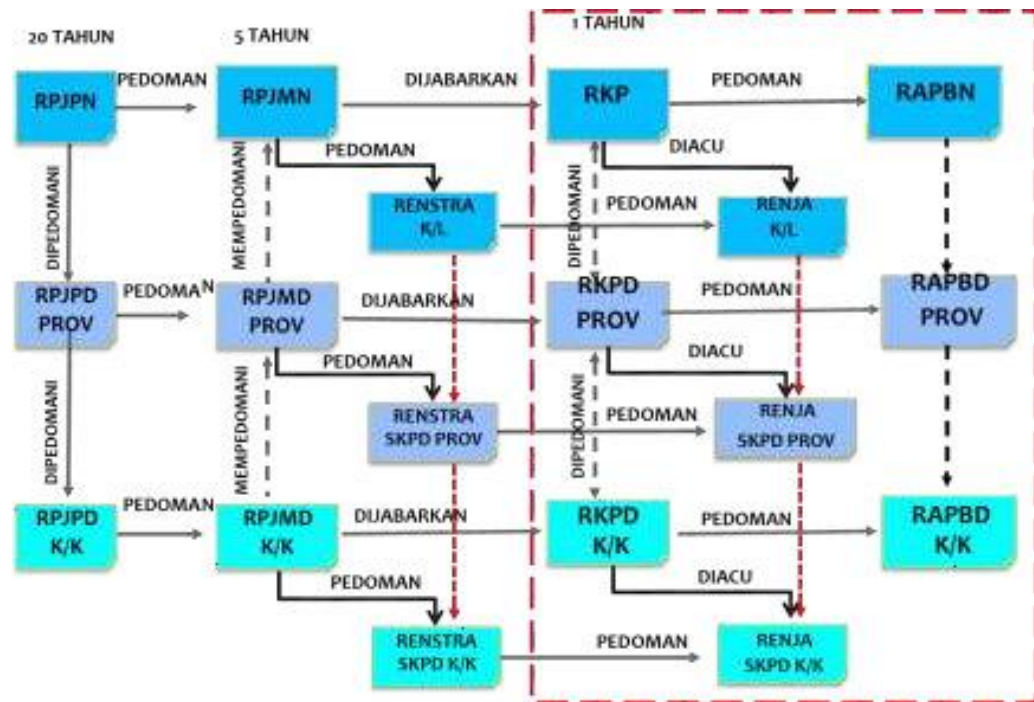
1.1. Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2026 ini merupakan penjabaran rencana strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan akhir ini berdasar pada rancangan RKPD dan rencana strategis (Renstra) tahun 2025-2029 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Pada pasal 138 ayat 1 Permendagri No. 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD dan perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD (pasal 138 ayat 2).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029. Sebagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, bahwa Renstra PD Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.



Gambar 1 : Bagan Hubungan antara Dokumen Perencanaan

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo No. 38 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dan Struktur organisasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan.

Peraturan Gubernur ini menyebutkan bahwa Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam

Bidang Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Bidang Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan,
- b. Penggordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan:
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan,
- d. Penggordinasian dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan,
- e. Penggordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo,
- f. Pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, dan
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Kumperindag diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta dengan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Pada rancangan rencana kerja ini telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2024 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2025. Sebagai acuan Kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan program kegiatan pada rancangan Renja PD Tahun 2026 yaitu dengan memperhatikan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas daerah maupun program prioritas masing-masing perangkat daerah yang tertuang dalam rancangan RKPD tahun 2026 dan memperhatikan indikator sasaran utama, indikator program dan indikator kegiatan utama OPD. Rencana Kerja PD Tahun 2026 harus dapat menjawab permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi OPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD dirumuskan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD tahun 2026, mempedomani Renstra PD 2025-2029, serta RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Renja PD juga mengacu pada permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, perencanaan Pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah serta bawah atas.

Rancangan Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja OPD dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia.

Periode pertama dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2025 - 2045, yaitu Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan. Visi pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2045 diarahkan pada pencapaian tujuan dan harapan masyarakat Gorontalo sebagai Provinsi Madani 2045.

Gorontalo Maju, diartikan bahwa di tahun 2045 Provinsi Gorontalo mencapai masyarakat yang Sejahtera, Produktif dan Inovatif. Sejahtera

adalah masyarakat Gorontalo semakin makmur dengan menurunnya kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran semakin kecil, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial. Produktif, yaitu pengelolaan sumber daya alam untuk perekonomian yang kompetitif, sumber daya manusia yang berkualitas, penguasaan ilmu dan teknologi, meningkatnya konektivitas dan sarana prasarana, pemerintahan yang professional dan berakhlak, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan meningkatnya investasi dengan keamanan dan ketertiban daerah yang terus terjaga. Inovatif, yaitu Pembangunan Gorontalo yang mengedepankan strategi pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi untuk mewujudkan daya saing daerah.

Berkelanjutan, dimaksudkan Pembangunan di Provinsi Gorontalo menerapkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan sosial yang adil, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta didukung oleh tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kualitas hidup masyarakat meningkat ditandai dengan kesehatan yang merata, pendidikan tinggi, lingkungan pemukiman yang bersih dan nyaman, bebas polusi udara air, suara, sampah dan kondisi daratan dan lautan yang tetap lestari dan terjaga dengan baik.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Akhir Renstra Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, yaitu:

Dasar Hukum penyusunan Akhir Renstra Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
 7. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 8. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
 11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Barang Kebutuhan Pokok Di Daerah
22. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
23. Peraturan Gubernur Gorontalo No. 38 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Gubernur Gorontalo No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 yaitu :

A. Maksud

Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk memberikan arah dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2026 secara berkesinambungan.

B. Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2026 adalah :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahun 2026.
2. Menjadi sarana untuk mengukur tingkat capaian sasaran program dan kegiatan SKPD dalam mendukung pencapaian sasaran RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dan Renstra Diskumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2026 yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Diskumperindag Provinsi Gorontalo yang tercantum dalam Renstra Diskumperindag periode 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kumperindag Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, dalam Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, yang meliputi Sub Bab *Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan* serta *Sistematika Penulisan*.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024, Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025, yang dikaitkan dengan capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan beserta isu-isu yang melingkupi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta kajian terhadap rancangan RKPD dan telaah usulan program dan kegiatan masyarakat, Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, yang meliputi Sub Bab *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD* serta *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, Bab ini diawali dengan kajian kebijakan nasional yang mempengaruhi pencapaian pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, kajian terhadap isu-isu penting yang mendasari perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah, yang meliputi Sub Bab *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah* serta *Program dan Kegiatan*.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP, Bab ini menguraikan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo setelah refocusing anggaran melaksanakan 10 program, 15 kegiatan, 22 sub kegiatan dengan Realisasi Fisik 100 % dan Realisasi Keuangan 99,40%. Adapun program dan kegiatan beserta realisasi keuangan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 : Program dan Kegiatan beserta Realisasi Keuangan Tahun 2024

Uraian	Pagu 2024	Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi	
					Fisik	Keu
	37.320.809.366	41.063.393.248	40.817.064.768	246.328.480	100	99,40
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	32.538.964.016	31.200.339.016	31.055.710.021	144.628.995	99,99	98,87
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	32.538.964.016	31.200.339.016	31.055.710.021	144.628.995	99,99	98,87
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	77.755.475	77.755.475	77.523.325	232.150	100	99,70
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.755.475	77.755.475	77.523.325	232.150	100	99,70
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.755.475	77.755.475	77.523.325	232.150	100	99,70
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.649.855.250	1.649.855.250	1.574.724.942	75.130.308	100	95,45
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.649.855.250	1.649.855.250	1.574.724.942	75.130.308	100	95,45
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.649.855.250	1.649.855.250	1.574.724.942	75.130.308	100	95,45
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	670.416.750	675.696.750	674.952.700	744.050	99,93	99,89



Uraian	Pagu 2024	Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi	
					Fisik	Keu
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	670.416.750	675.696.750	674.952.700	744.050	99,93	99,89
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	670.416.750	675.696.750	674.952.700	744.050	99,93	99,89
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.267.183.250	1.293.583.250	1.275.335.035	18.248.215	100	98,59
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1.267.183.250	1.293.583.250	1.275.335.035	18.248.215	100	98,59
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	132.000.000	158.400.000	157.908.000	492.000	100	99,69
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	1.135.183.250	1.135.183.250	1.117.427.035	17.756.215	100	98,44
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	16.258.400.000	15.115.145.000	15.114.181.261	963.739	100	99,99
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	16.258.400.000	15.115.145.000	15.114.181.261	963.739	100	99,99
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	16.258.400.000	15.115.145.000	15.114.181.261	963.739	100	99,99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.615.353.291	12.388.303.291	12.338.992.758	49.310.533	100	99,60
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.472.275	489.736.075	488.758.974	977.101	100	99,80
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.913.275	271.551.075	270.838.678	712.397	100	99,74
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.559.000	218.185.000	217.920.296	264.704	100	99,88
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.110.979.666	9.753.272.966	9.721.559.062	31.713.904	100	99,67
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.077.130.216	9.691.630.216	9.659.965.973	31.664.243	100	99,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.849.450	61.642.750	61.593.089	49.661	100	99,92
Administrasi Umum Perangkat Daerah	553.632.000	469.510.000	468.234.790	1.275.210	100	99,73
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	553.632.000	469.510.000	468.234.790	1.275.210	100	99,73
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.736.269.350	1.675.784.250	1.660.439.932	15.344.318	100	99,08
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.736.269.350	1.675.784.250	1.660.439.932	15.344.318	100	99,08



Uraian	Pagu 2024	Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi	
					Fisik	Keu
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.781.845.350	9.863.054.232	9.761.354.747	101.699.485	99	99,35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.920.037.100	7.720.000.982	7.622.759.003	97.241.979	99	98,92
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	29.616.750	29.616.750	29.467.120	149.630	100	99,49
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	29.616.750	29.616.750	29.467.120	149.630	100	99,49
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	29.616.750	29.616.750	29.467.120	149.630	100	99,49
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.474.200.100	5.718.663.982	5.652.890.227	65.773.755	100	98,85
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.474.200.100	5.718.663.982	5.652.890.227	65.773.755	100	98,85
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	103.400.000	124.080.000	123.978.000	102.000	100	99,92
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.370.800.100	5.594.583.982	5.528.912.227	65.671.755	100	98,83
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.416.220.250	1.971.720.250	1.940.401.656	31.318.594	96,88	98,41
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.253.616.750	1.809.116.750	1.778.113.248	31.003.502	100	98,29
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.253.616.750	1.809.116.750	1.778.113.248	31.003.502	100	98,29
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	123.166.750	123.166.750	122.853.360	313.390	100	99,75
Pengembangan Layanan Pengujian	53.322.000	53.322.000	53.134.150	187.850	100	99,65
Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	69.844.750	69.844.750	69.719.210	125.540	87,50	99,82
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	39.436.750	39.436.750	39.435.048	1.702	100	99,99
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	39.436.750	39.436.750	39.435.048	1.702	100	99,99
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.861.808.250	2.143.053.250	2.138.595.744	4.457.506	100	99,79
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.861.808.250	2.143.053.250	2.138.595.744	4.457.506	100	99,79
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi	1.861.808.250	2.143.053.250	2.138.595.744	4.457.506	100	99,79

Uraian	Pagu 2024	Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi	
					Fisik	Keu
Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	388.561.750	728.251.750	727.654.648	597.102	100	99,92
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.366.629.750	1.292.784.750	1.289.055.716	3.729.034	100	99,71
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	106.616.750	122.016.750	121.885.380	131.370	100	99,89

Dari tabel 2.1 dapat disampaikan realisasi keuangan 99,40% dari 11 program, 16 kegiatan, 28 sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 dan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,40%.

- a. Realisasi fisik & Keuangan terendah (tidak memenuhi target fisik dan keuangan) ada pada beberapa program yaitu :

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dengan realisasi fisik 99,93 % & 99,89% realisasi keuangan. Realisasi Fisik tidak mencapai 100% karena terdapat item belanja fotocopy senilai Rp. 504.000,- yang tidak dibelanjakan. Adapun realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena adanya sisa belanja yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target fisik dan keuangan yang direncanakan

Adapun untuk pencapaian realisasi fisik rata-rata mencapai 100% dan realisasi keuangan tertinggi pada nilai 99,99% belum mencapai target keuangan 100% karena masih terdapat sisa anggaran yang tidak dapat dimanfaatkan lagi (silva).

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target fisik dan keuangan yang direncanakan

Ditahun 2024 tidak terdapat program/kegiatan maupun sub kegiatan yang melebihi target. Target fisik rata-rata 100% dan realisasi keuangan tertinggi pada nilai 99,99% pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi; sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Adapun indikator kinerja sasaran Dinas Kumperindag, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 : Indikator Sasaran Diskumperindag Prov. Gorontalo Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	74,68	79,46	106,40
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)	Jumlah Koperasi Berkualitas	20 Kop	20 Kop	100
	Jumlah UKM yang berdaya saing	70 unit usaha	43 unit usaha	61,43
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	0,84%	0,38%	45,24
Meningkatnya nilai ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor	\$14.807.701	\$52.967.332,45	357,70

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Industri Kecil Menengah dan Perdagangan di Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebagai tahun kedua pelaksanaan RPD Tahun 2023 – 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam pencapaian sasaran. Adapun untuk capaian indikator sasaran dari tabel 2.2 tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Nilai SAKIP

capaian indikator sasaran strategis di tahun 2024 jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 telah mencapai target yang telah ditetapkan sebanyak 106,25%.

b. Jumlah Koperasi Berkualitas

Capaian indikator kinerja jumlah koperasi berkualitas jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 sebesar 100%. Dengan target 20 koperasi dan realisasi 22 koperasi. Dimana untuk koperasi berkualitas berdasarkan pemeringkatan. Aspek penilaian yaitu kelembagaan, usaha, keuangan, manfaat koperasi terhadap anggota, manfaat koperasi terhadap masyarakat. Dengan hasil pemeringkatan sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas dan tidak berkualitas

c. Jumlah UKM yang Berdaya Saing

Capaian indikator kinerja Jumlah UKM yang Berdaya Saing jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 sebesar 61,43%. Capaian indikator kinerja Jumlah UKM yang Berdaya Saing sebesar 83,34%, capaian ini berdasarkan target pada dokumen Renstra 60 UKM. Dengan indikator penilaian dari produktifitas produksinya, peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan output. Ketidakaapaian atas target ini disebabkan kurang optimalnya anggaran untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan fasilitasi terhadap UKM yang berpotensi. capaian atas realisasi ini diperoleh dari UKM yang telah mengikuti kurasi produk yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan Bank Indonesia. Indikator UKM yang berdaya saing antara lain adanya peningkatan produktifitas, peningkatan pangsa pasar serta pertumbuhan output.

d. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah jika dibandingkan dengan target Renstra 2023-2026 dan realisasi tahun 2024 sebesar 45,24 %.

Realisasi indikator kinerja “Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah” tidak mencapai target karena terbatasnya anggaran untuk penumbuhan wirausaha baru melalui APBD 2024. Jumlah industri

tahun 2024 diperoleh dari data penumbuhan wirausaha baru ditahun 2024 yang dibiayai melalui dana Tugas Pembantuan.

e. Jumlah Nilai Ekspor

Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor jika dibandingkan dengan dokumen renstra 2023-2026 adalah sebesar 357,70%, dimana target renstra \$14.807.701 dengan realisasi \$52.967.332,45

Data realisasi diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Asal dan BPS Provinsi Gorontalo. Tahun 2024 program pengembangan export karena keterbatasan fiskal daerah tidak teranggarkan di tahun 2024 sehingga pelaksanaan program kegiatan tidak maksimal.

Evaluasi pelaksanaan program tahun 2024 dan realisasi 2024 dilakukan terhadap indikator kinerja hasil program sebagai berikut:

Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024	Persentase (%)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	20	Koperasi	20	100
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	20	Dokumen	20	100
- Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan tersedianya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	20	Dokumen	20	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang	475	121,79
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	390	Orang	475	121,79
- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	390	Orang	475	121,79



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024	Persentase (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	20	Unit Usaha	20	100
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20	Unit Usaha	20	100
- Peningkatan produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20	Unit Usaha	20	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	140	Unit Usaha	43	30,72
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	250	Unit Usaha	525	165,1
- Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	Jumlah unit usaha UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	250	Unit Usaha	525	165,1
- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UMKM dan kewirausahaan	318	Orang	525	165,1
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	40	Unit Usaha	52	130
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah	40	Unit Usaha	50	125



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024	Persentase (%)
- Produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	40	Unit Usaha	14.303	35.757,5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	10	Dokumen	15	150
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	Dokumen	7	175
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	Dokumen	8	133
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	87	Orang	79	90,8
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87	Orang	79	90,8
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	87	Orang	-	-
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	87	Orang	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	31	Paket	18	58,07
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	31	Paket	18	58,07



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024	Persentase (%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Laporan	1	100
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	1	Laporan	1	100
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36	Dokumen	36	100
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	36	Dokumen	36	100
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	<i>Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri</i>	12	Dokumen	12	100
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	12	Dokumen	12	100
- Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	<i>Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri</i>	12	Dokumen	12	100
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Izin yang di fasilitasi & Dievaluasi	1	Dokumen	-	-
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	1	Dokumen	--	-



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024	Persentase (%)
- Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi : 1) Industri besar; 2) Industri kecil dan industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, 3) Kawasan Industri, dan perizinan perluasan kawasan Industri yang merupakan PMDN yang berlokasi lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1	Dok	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	12	Dokumen	-	-
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12	Dokumen	-	-
- Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12	Dokumen	-	-
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi dan diawasi	Dok	2	1	50
Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Dok	9	47	522,2



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024	Persentase (%)
- Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	Dok	9	47	522,22
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting	Laporan	28	43	153,58
Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	16	43	100
- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota	Laporan	12	12	100
- Operasi pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan	4	31	775
Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Laporan	12	-	-
- Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	Laporan	12	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	Komoditi	7	8	114,29



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024	Persentase (%)
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	Pelaku Usaha	7	-	-
- Misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	7	-	-
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	Dokumen	7	7	100
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kab/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	Kasus	11	297	2700
- Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen	Jumlah badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang aktif	BPSK	6	6	100
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Dokumen	153	145	94,78
- Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial Yang Dipantau	Komoditi	3	-	-
- Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang	Dokumen	150	141	94
- Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah sertifikasi produk yang diterbitkan	Sertifikat	3	4	133,34
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	Pelaku Usaha	40	45	112,50
- Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen	Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	Laporan	12	12	100

Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2024 melaksanakan 11 program, 16 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Adapun capaian atas pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- a. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
- e. Program pengendalian izin usaha industri
- f. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
- g. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, indikator kinerja
- h. Program Pengembangan export, Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
- i. Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida Tingkat daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya, indikator Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
- j. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota

2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program, kegiatan yang telah memenuhi target di tahun 2024 yaitu :

- a. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, dengan indikator Jumlah Koperasi Sehat target 20 koperasi realisasi 20 koperasi
- b. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

- Daerah Provinsi, dengan indikator Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi target 20 dokumen realisasi 20 dokumen
- c. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan indikator Jumlah Koperasi Aktif target 20 unit usaha, realisasi 20 unit usaha
 - d. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, indikator Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha target 20 unit usaha, capaian 20 unit usaha
 - e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (capaian 100%) indikator Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan target 100%. Realisasi 100%
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (capaian 100%) dari target 1 laporan.
 - g. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (capaian 100%) indikator Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri target 36 dokumen
 - h. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan capaian 100% dengan indikator Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan target 16 laporan

- i. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, capaian 100% indikator Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen target 7 dokumen

3. Realisasi Program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program/kegiatan yang telah melebihi target di tahun 2024:

- a. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, indikator Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya capaian 121,79% (target 390 orang, realisasi 475 orang)
- b. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian capaian 121,79 (target 390 orang, realisasi 475 orang)
- c. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan, indikator Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya capaian 165,1% (target 250 unit usaha, realisasi 525 unit usaha)
- d. Program pengembangan UMKM capaian 130% indikator Jumlah UKM yang bertransformasi usaha (target 40 unit usaha, realisasi 52 unit usaha)
- e. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah indikator Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah capaian 125% (target 40 unit usaha, realisasi 50 unit usaha)
- f. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah capaian 150%
- g. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan

Angka Pengenal Importir (API) dengan capaian 522,2 yaitu indikator Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) target 9 dokumen, capaian 47 dokumen

- h. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan indikator Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting capaian 153,58% (target 28 laporan, realisasi 43 laporan)
- i. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kab/Kota, capaian 2700% dengan indikator Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen target 11 kasus , capaian 297 kasus
- j. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota, indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi capaian 112,50% dari target 40 pelaku usaha, realisasi 45 pelaku usaha

Adapun pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja antara lain :

Jumlah koperasi Sehat, Adapun target yang ditetapkan di akhir periode RPD sebanyak 60 koperasi sehat. Adapun untuk capaian tahun 2024 adalah sebanyak 20 koperasi sehat dengan target sebanyak 20 Koperasi sehat.

Perkembangan koperasi di Provinsi Gorontalo masih perlu perhatian. Dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, stabilitas dan daya saing koperasi, sehingga dapat berkontribusi optimal pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat seperti penguatan kelembagaanya, pembinaan koperasi, revitalisasi koperasi, penguatan external, teknologi, dll. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. *Perkembangan Kinerja Koperasi 2021-2024*

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi Aktif (unit)	907	957	985	1.042	1.033
Jumlah Koperasi Tidak Aktif (unit)	430	430	429	434	474
Total Koperasi	1.337	1.387	1.414	1.476	1.507
Jumlah Anggota	140.296	142.713	144.415	146.926	157.109
RAT (unit)	227	221	252	245	190
Jumlah Manager (orang)	356	350	359	344	338
Jumlah Karyawan (orang)	2.170	2.173	2.203	2.193	2.040
Jumlah Asset (Rp. 000)	517.257.795	651.366.521	572.374.634	729.454.672	615.213.443
Modal Sendiri (Rp. 000)	269.839.272	306.039.971	333.383.296	507.993.442	437.652.811
Jumlah Modal Luar (Rp. 000)	208.706.686	209.392.718	218.373.188	211.188.473	191.556.581
Volume Usaha (Rp. 000)	398.344.178	414.931.109	414.951.877	361.764.790	373.348.309
SHU (Rp. 000)	28.632.564	28.393.614	30.508.386	29.303.701	35.973.381

Sumber : Data olahan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo , 2025

Perkembangan Koperasi di Provinsi Gorontalo menunjukkan kinerja yang kurang baik. Pada periode 2023 hingga 2024 jumlah koperasi aktif mengalami penurunan 0,86%, dan jumlah koperasi tidak aktif naik 9,22%. Selang tahun 2020 hingga 2024 jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan sebesar 13,89%. Akan tetapi secara keseluruhan jumlah koperasi mengalami peningkatan. Adapun jumlah koperasi yang melaksanakan RAT mengalami penurunan selang tahun 2020-2025 sebesar 16,3%. Volume usaha koperasi selang tahun 2020-2024 menunjukkan dinamika di mana di tahun 2021-2022 mengalami kenaikan dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14,7%.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini antara lain dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu :

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi pada 25 koperasi dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi 20 Koperasi

Tujuan Pelaksanaan kegiatan :

- Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan

- Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
- Meningkatkan fungsi Pengawasan Koperasi yang efektif dan efisien, sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
 - Meningkatkan Kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi dengan peraturan yang berlaku.
 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Primer Provinsi Gorontalo dan pengawasan/monev koperasi penerima bantuan/penghargaan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kabupaten/Kota.
- b. Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Koperasi di Provinsi Gorontalo untuk menyatukan persepsi pemahaman tentang Peraturan Perkoperasian dan Pengawasan Koperasi bagi Pembina Koperasi sebanyak 40 orang, dengan menghadirkan Narasumber Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Utama dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- c. Dalam pencapaian kinerja program yaitu jumlah koperasi sehat terdapat 4 (empat) aspek pemeriksaan kesehatan koperasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi No. 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan. Terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat diberikan sertifikat kesehatan. Terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus ditindaklanjuti dengan sanksi administratif. Sertifikat kesehatan atau sanksi administratif ditetapkan oleh deputi/perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan LHPKK. Adapun capaian Koperasi sehat tahun 2024 sebagai berikut :



Tabel 2.5
Daftar Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Primer Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

NO	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
1	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KESEHATAN DAERAH KKPKD	372/BH/V, Tgl. 26 November 1982	Konsumen	Sehat
		PAD. No.AHU-0002766.AH.01.38.TAHUN 2022		
		Tgl. 23 Desember 2022		
2	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WIYOWA	07/BH/518/DTKTK/IV/04, Tgl. 13 April 2004	Konsumen	Sehat
		PAD. No.AHU-0000740.AH.01.39.TAHUN 2024		
		Tgl. 28 Februari 2024		
3.	KOPERASI SERBA USAHA KARYA PRASETYA	36/BH/XXII/VII/2015 Tgl. 15 Juli 2015	Konsumen	Sehat
4.	KSP KARYA CIPTA DANA PROVINSI GORONTALO	33/BH/XXII/XII/2014 Tgl. 22 Desember 2014	Simpan Pinjam	Sehat
5.	KSP AL HIKMAT PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	31/BH/XXII/III/2014, Tgl. 21 Maret 2014	Simpan Pinjam	Sehat
6.	KPRI WIRA USAHA BARU	21/BH/XXII/III/2011, Tgl. 18 Maret 2011	Konsumen	Sehat
7.	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KARTIKA OTANAHA	1449/BH/V, Tgl. 8 Juni 1971	Konsumen	Sehat
		PAD No.AHU-000142.AH.01.27 TAHUN		
		Tgl. 19 Oktober 2021		
8.	KSP DHANA PANEN RAYA	AHU-0015444.AH.01.26.TAHUN 2022	Simpan Pinjam	Sehat
		Tgl. 9 Pebruari 2022		
9.	KOPERASI KONSUMEN AUDITA MITRA SEJAHTERA	AHU-0005599.AH.01.29 TAHUN 2022	Konsumen	Sehat
		Tgl. 22 Oktober 2022		
10.	KOP. KONS. KARYAWAN TIRTA BONE PDAM KOTA GORONTALO	250/BH/V, Tgl. 23 Januari 2012	Konsumen	Sehat
		PAD No.AHU-0002276.AH.01.27.TAHUN 2021		
		Tgl. 11 Mei 2021		



NO	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
11.	KOPERASI KONSUMEN PERMATA SEJAHTERA HULONTHALAGI	AHU-0016261.AH.01.26 TAHUN 2022 Tgl.13 Maret 2022	Konsumen	Sehat
12.	KOPERASI PRODUSEN HUYULA MOMONGU LIPU	AHU-0004076.AH.01.29.TAHUN 2022 Tgl. 04 Agustus 2022	Produsen	Cukup Sehat
13.	KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA TERATAI LIMUTU	1685/BH/V, Tgl. 30 Oktober 1971 PAD No.AHU-0002091.AH.01.38.TAHUN 2023 Tgl. 05 September 2023	Konsumen	Cukup Sehat
14.	KOPERASI KONSUMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	AHU-0014715.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl. 12 Januari 2022	Konsumen	Cukup Sehat
15.	KOPERASI KONSUMEN BKPD MAJU BERSAMA	AHU-0001579.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 11 April 2023	Konsumen	Cukup Sehat
16.	KOPERASI KONSUMEN BATARA BTN GORONTALO	450/BH/V/07, Tgl. 20 April 2007 PAD No.AHU-0002804.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 29 Desember 2022	Konsumen	Cukup Sehat
17	KOPERASI KONSUMEN MUSLIMAH AMANAH BERSATU	AHU-0002794.AH.01.29.TAHUN 2023 . Tgl. 14 Juli 2023	Konsumen	Cukup Sehat
18.	KOPERASI KONSUMEN SEHAT SEJAHTERA BERSAMA AINUN	AHU-00100002.AH.01.36.TAHUN 2021. Tgl. 27 April 2021	Konsumen	Cukup Sehat
19.	KOPERASI KONSUMEN AMPERA MANDIRI SEJAHTERA	AHU-0000422.AH.01.26.TAHUN 2019. Tgl. 19 November 2019	Konsumen	Cukup Sehat
20	KOPERASI JASA NEZFA PANUA BERKAH	AHU-0001073.AH.01.29.TAHUN 2023. Tgl. 08 Mei 20223	Jasa	Cukup Sehat

Sumber : Bidang Kelembagaan & Pengawasan, Diskumperindag
Prov. Gorontalo 2024

Jumlah SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya, pada program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian realisasi yang dicapai 475 orang dari target yang ditetapkan sebesar 390 orang ditahun 2024, Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini antara lain dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi serta pelaku usaha bagi UKM di Provinsi Gorontalo (DAK Non Fisik PK2UKM).

Jumlah Pagu DAK Non peningkatan kapasitas SDM Koperasi sebesar Rp. 1.544.590.500,- dengan realisasi Rp. 1.469.566.222,- (95,14%), silva Rp. 75.014.278,-

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK tahun 2024, dilaksanakan 19 angkatan dengan jumlah peserta 475 orang yang berasal dari koperasi binaan Kab/Kota dan Provinsi. Untuk koperasi binaan Provinsi berjumlah 112 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari Pengurus Pengawas dan anggota Koperasi dalam mengelola koperasi agar lebih kuat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sehingga koperasi dapat mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

Tahap I :

Pelaksanaan Tanggal 14 s.d 16 Mei 2024

1. Pelatihan Akuntansi Koperasi tingkat Prov. Gorontalo : 25 peserta
2. Pelatihan Nilai dasar & Jati Diri Koperasi tingkat Prov. Gorontalo : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 17 s.d 19 Mei 2024

3. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT : 25 peserta
4. Pelatihan Pengawasan Koperasi : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 05 s.d 07 Juni 2024

5. Pelatihan Akuntansi Koperasi Tkt Kab. Boalemo : 25 peserta
6. Pelatihan Nilai dasar Jati Diri II di Kab. Boalemo : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 20 s.d 22 Juni 2024

7. Pelatihan Nilai dasar & Jati Diri Koperasi III di Kab. Gorontalo : 25 peserta

8. Pelatihan Nilai dasar & Jati Diri Koperasi IV di Kab. Pohwato : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 26 s.d 28 Juni 2024

9. Pelatihan Akuntansi Koperasi III Di Kab. Pohuwato

Tahap II :

Pelaksanaan Tanggal 18 s.d 20 September 2024

1. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT Tkt Kab. Pohuwato: 25 peserta

2. Pelatihan Penerapan Akuntansi Digital Koperasi Tkt. Kab. Pohuwato: 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 25 s.d 07 September 2024

3. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT Tkt. Kab. Boalemo : 25 peserta

4. Pelatihan Penerapan Akuntansi Digital Koperasi Tkt. Kab. Boalem: 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 16 s.d 18 Oktober 2024

5. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT Tkt. Prov Gorontalo : 25 peserta

6. Pelatihan Akuntansi Koperasi Tkt. Kab. Gorontalo Utara : 25 peserta
Pelaksanaan Tanggal 05 s.d 07 November 2024

7. Pelatihan Akuntasi Koperasi Tkt. Prov Gorontalo : 25 peserta

8. Pelatihan Pengawasan Koperasi Tkt. Prov. Gorontalo : 25 peserta
Pelaksanaan Tanggal 08 s.d 10 November 2024

9. Pelatihan Koperasi Berbasis Bisnis Tkt. Prov Gorontalo : 25 peserta

10. Pelatihan Kompetensi Bagi pengurus Tkt. Prov. Gorontalo : 25 peserta

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari Pengurus Pengawas dan anggota Koperasi dalam mengelola koperasi agar lebih kuat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sehingga koperasi dapat mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Jumlah Koperasi Aktif, pada program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Outcome program ini adalah Jumlah Koperasi Aktif (20 Unit usaha). Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini antara lain dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu :

a. Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi (Bedah) Koperasi dilaksanakan di Kabupaten /Kota Se-Provinsi Gorontalo sebanyak 9 Koperasi.

NO	NAMA KOPERASI	LOKASI	JENIS KOPERASI
1	KOPERASI KONSUMEN SEHAT SEJAHTERA BERSAMA AINUN	Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo	Konsumen
2	KSU BUHUTA WAWU WAALAMA	Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo	Konsumen
3.	KOPERASI SIMPAN PINJAM FAJAR PESISIR	Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo	S.Pinjam
4.	KOPERASI KONSUMEN AMPERA MANDIRI SEJAHTERA	Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo	Konsumen
5.	KOPERASI SINAR MANDIRI SENSEI	Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato	Jasa
6.	KOPERASI HULAWA TINELO LIPU	Kecamatan Sumalata Timu Kabupaten Gorontalo Utara	Produsen
7.	KOPERASI KONSUMEN PASOLO CERIA BERSAMA	Kecamatan Sumalata Timu Kabupaten Gorontalo Utara	Konsumen
8.	KOPERASI PRODUSEN HULAWA BINA MANDIRI	Kecamatan Sumalata Timu Kabupaten Gorontalo Utara	Produsen
9.	KOPERASI KONSUMEN PASOLO INDAH JAYA	Kecamatan Sumalata Timu Kabupaten Gorontalo Utara	Konsumen

b. Bantuan Dana Hibah Koperasi berupa uang kepada 3 (tiga) koperasi yaitu :

~ Koperasi Pinus Jaya Sejahtera Desa Mootilango Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo badan Hukum Nomor : 007425/BH/M.KUKM.2/II/2018 tanggal 20 Februari 2018. NPHD nomor 202/DKUPP/I/2024 tanggal 30 Januari 2024

- ~ Koperasi Produsen Bandayo Ar-Rahman Moosalamati, Kel. Huto'o Kec. Limboto badan Hukum 381/BH/DKPP/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011. NPHD nomor 201/DKUPP/I/2024 tanggal 30 Januari 2024
- ~ Koperasi Konsumen Saitama Mandiri Jaya, Desa Pasalae, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara. No Badan Hukum (BH) : AHU 0016221.AH.01.26. Tahun 2022. NPHD nomor 203/DKUPP/I/2024 tanggal 30 Januari 2024

Jumlah UKM Yang Berdaya Saing, pada tahun 2024 target UKM yang berdaya saing sebanyak 140 unit usaha dan realisasinya mencapai 43 unit usaha. Target kinerja program tidak tercapai karena keterbatasan anggaran dalam mengintervensi kegiatan antara lain peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada pelaku UKM khususnya untuk melakukan pembinaan (digitalisasi pemasaran) administrasi keuangan, dan bedah produk dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan ditahun 2024 untuk mendukung ketercapaian target ini antara lain :

- a. Sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Kalangan Kerja, mPemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.

Output Kegiatan ini adalah :

Honorarium jasa tenaga pelayanan umum (tenaga konsultan pendamping PLUT) 5 orang selama 12 bulan dalam rangka pendampingan kepada para pelaku UMKM.

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi serta pelaku usaha bagi UKM di Provinsi Gorontalo (DAK Non Fisik KUKM)

Peningkatan kapasitas SDM UMKM

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UKM tahun 2024 dilaksanakan 2 angkatan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM UMKM dengan jumlah peserta 375 orang yang berasal dari Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo dan Kabupaten Pohuwato dan Sosialisasi penyuluhan hukum bagi UMKM dalam rangka peningkatan SDM bagi pelaku usaha serta pemahaman terhadap hukum bagi 150 UKM/IKM/Pelaku se Provinsi Gorontalo..

Pelaksanaan Tanggal 14 s.d 16 Mei 2024

1. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis bagi UMKM Aneka Kripik :
Di Kabupaten Boalemo : 25 peserta
2. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis bagi UMKM Aneka Kue kering:
Di Kabupaten Boalemo : 25 peserta
3. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis bagi UMKM Aneka Kue kering:
Di Kabupaten Pohuwato : 25 Peserta

Pelaksanaan Tanggal 13 Mei 2024

4. Sosialisasi Penyuluhan Hukum bagi UMKM di Kab. Pohuwato : 50 peserta
5. Sosialisasi Penyuluhan Hukum bagi UMKM di Kab. Boalemo : 50 peserta

Pelaksanaan Tanggal 29 s.d 31 Mei 2024

6. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis Bagi UMKM Aneka Kue di Kab. Bone Bolango : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 01 s.d 03 Juni 2024

7. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis Bagi UMKM Aneka Kripik Di Kab. Bone Bolango : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 30 s.d 01 Juni 2024

8. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis Bagi UMKM Aneka Kue Di Kab. Gorontalo Utara : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 29 Mei 2024

9. Sosialisasi Penyuluhan Hukum bagi UMKM di Kab. Gorontalo Utara: 50 peserta

Tahap II :

Pelaksanaan Tanggal 26 s.d 28 September 2024

1. Diklat teknik pembuatan pola kreatif bagi UMKM : 25 peserta
Di Kabupaten Boalemo

2. Diklat teknik pembuatan pola kreatif bagi UMKM : 25 peserta
Di Kabupaten Pohuwato

Pelaksanaan Tanggal 11 s.d 13 Oktober 2024

3. Diklat teknik pembuatan pola kreatif bagi UMKM : 25 Peserta
Di Kabupaten Bone Bolango

Pelaksanaan Tanggal 12 s.d 14 Oktober 2024

4. Diklat teknik pembuatan pola kreatif bagi UMKM : 25 peserta
Di Kab. Gorontalo Utara

Pelaksanaan Tanggal 08 s.d 10 November 2024

5. Diklat Desain Baju & Menjahit bagi UMKM : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 11 Oktober 2024

6. Sosialisasi Penyuluhan Hukum Bagi UMKM : 50 peserta
di Kab. Bone Bolango

Pelaksanaan Tanggal 10 Oktober 2024

7. Sosialisasi Penyuluhan Hukum Bagi UMKM : 50 peserta

Jumlah UKM Yang Bertransformasi Usaha, pada tahun 2024 targetnya sebesar 40 unit usaha dengan realisasi capaian 52 unit usaha. pencapaian ini dilakukan antara lain dengan memaksimalkan pada beberapa kegiatan antara lain :

- a. Terlaksananya Bantuan Bahan Produksi/Olahan Bagi UMKM, bantuan ini diperuntukan bagi UKM Olahan pangan, Kios, warung makan, aneka minuman Se Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada juknis yang berlaku.



Rekapan Penerima Bantuan Tahap I Tahun 2024		
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima
1	Kota Gorontalo	4679
2	Kabupaten Gorontalo	3761
3	Kabupaten Boalemo	703
4	Kabupaten Pohuwato	468
5	Kabupaten Bone Bolango	533
6	Kabupaten Gorontalo Utara	1895
Total		12.039

Rekapan Penerima Bantuan Tahap II Tahun 2024		
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima
1	Kota Gorontalo	939
2	Kabupaten Gorontalo	719
3	Kabupaten Bone Bolango	470
4	Kabupaten Gorontalo Utara	136
Total		2264

- b. Benchmarking bagi pelaku UMKM yang diikuti oleh 20 pelaku usaha dari Kabupaten Boalemo ke Alverna Bakery, Lin's Bakery di Jakarta.
- c. verifikasi, validasi dan penyaluran bantuan UMKM di Provinsi Gorontalo

Tabel 2.6 . Data Perkembangan Jumlah UKM tahun 2022-2024

WILAYAH	2022				2023				2024			
	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
KOTA GORONTALO	11415	2692	400	14507	11560	2692	400	14652	17227	2692	400	20319
KABUPATEN GORONTALO	29596	419	12	30027	30285	419	12	30716	37897	419	12	38328
KABUPATEN BOALEMO	10193	1493	202	11888	10201	1493	202	11896	11925	1493	202	13620
KABUPATEN POHUWATO	10914	85	19	11018	11629	87	19	11735	13184	87	19	13290
KABUPATEN BONE BOLANGO	7699	174	26	7899	7830	174	26	8030	11174	174	26	11374
KABUPATEN GORONTALO UTARA	5475	213	15	5703	5475	213	15	5703	8350	213	15	8578
JUMLAH	75292	5076	674	81042	76980	5078	674	82732	99757	5078	674	105509

Sumber : Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi Usaha Kecil, Diskumperindag Provinsi Gorontalo

Jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 naik 28% dari tahun 2023, Perkembangan UMKM di Provinsi Gorontalo terjadi peningkatan yang signifikan jumlah UMKM di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun. Pada Berdasarkan data UMKM per skala usaha di Provinsi Gorontalo, di dominasi yang pada kategori usaha mikro. Dari total 105.509 UMKM, sebanyak 99.757 unit atau sekitar 94,5% merupakan usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Gorontalo memulai bisnis dengan skala yang relatif kecil. UMKM di Gorontalo cenderung rentan dengan gejolak dan tekanan ekonomi, terlebih jika ada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Hal ini membutuhkan upaya yang keras dari berbagai pihak. Penguatan SDM, kelembagaan maupun permodalan dan akses pemasaran sangat dibutuhkan.

Perkembangan jumlah UMKM belum diikuti dengan peningkatan produktifitas, daya saing usaha dan permodalan, sehingga UMKM di Gorontalo cenderung rentan dengan gejolak dan tekanan ekonomi, terlebih jika ada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. perkembangan kuantitas KUMKM belum dibarengi dengan perkembangan kualitas yang dapat memberi nilai tambah yang besar bagi pelaku usaha. Hal ini disebabkan KUMKM Provinsi Gorontalo belum didukung sepenuhnya dengan permodalan yang cukup, teknologi tepat guna, dan promosi produk untuk pemasaran yang efektif serta belum didukung oleh kemitraan, subkontrak, waralaba (*franchise*), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (*joint venture*), bagi hasil.

Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri, adapun persentase capaian indikator program pengembangan industri kecil menengah tahun 2024 sebesar 100% dari target 36 Dokumen. Pencapaian ini adalah selain dari dukungan dana APBD juga mendapat dukungan penyelenggaraan kegiatan melalui dana

dekonsentrasi. Kebijakan pembangunan perindustrian difokuskan pada peningkatan peran IKM dalam perekonomian daerah. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Tabel 2.7. Perkembangan IKM Kabupaten/Kota. Tahun 2020 – 2024

No.	JUMLAH INDUSTRI KECIL MENENGAH	Unit Usaha (IKM)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	KOTA GORONTALO	3229	3554	2646	2.293	2.373
2	KABUPATEN GORONTALO	3442	3486	4292	4.397	4.512
3	KABUPATEN BOALEMO	847	105	109	1094	1096
4	KABUPATEN POHUWATO	3042	2547	895	1.806	2.504
5	KABUPATEN GORONTALO UTARA	697	705	76	926	1.201
6	KABUPATEN BONE BOLANGO	2923	3018	2489	2694	2885
JUMLAH		14180	13415	10507	13210	14571

Sumber : Dinas Kumperindag Kabupaten/Kota Tahun 2025

Industri Kecil Menengah dalam peraturan Menteri 64/M-IND/PER/7/2016 yang dimaksud dengan Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Berdasarkan cabang IKM terdiri atas industri kerajinan, sandang, pangan, logam dan kimia. Selang tahun 2023-2024, jumlah IKM mengalami peningkatan 7,1%. Ditahun 2022 hingga 2023 dilakukan Upaya updating data yang masuk dari Kabupaten/kota untuk meminimalisir data ganda serta data IKM yang sudah tidak aktif lagi karen meninggal dll. Sehingga terjadi penurunan jumlah IKM. Hal ini dapat dilihat pada table diatas. Pertumbuhan IKM ini didukung oleh jaringan pemasaran produk yang semakin luas, kebijakan pemerintah daerah yang makin berpihak terhadap IKM, antara lain

penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis bagi IKM serta stimulan bantuan bagi IKM. Pelaksanaan kegiatan masih sangat membutuhkan dukungan anggaran yang cukup, agar bisa mencakup lingkup yang lebih luas dalam pembinaan dan penumbuhan IKM.

Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran adalah kegiatan penyusunan, penerapan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri

~ Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat bagi IKM Pangan dan Furniture yaitu Fasilitasi tempat usaha, bahan dan peralatan, listrik bagi IKM Pangan bagi 7 IKM pada pagu induk dan 12 penerima di APBD-P(*terlampir*)

Tujuan :

- Mendorong terciptanya Wira Usaha Baru yang mandiri dan professional yang mampu menciptakan lapangan kerja.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas produk.
- Meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat.
- Memanfaatkannya peluang pasar lokal, regional dan nasional

~ Verifikasi, Pengawasan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

- Untuk memastikan kelompok usaha yang telah memasukkan proposal permohonan bantuan modal usaha telah memenuhi persyaratan.
- Pengembangan industri Pangan dan Furniture yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing,

Sasaran Pelaksanaan kegiatan yaitu calon penerima bantuan IKM Pangan dan Furniture di Kabupaten/Kota

~ Terlaksananya pembayaran jasa tenaga pelayanan umum 2 orang

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

~ Bantuan Bahan dan Peralatan IKM Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut bagi 23 UKM/IKM/Pelaku usaha Industri sandang, aneka dan kerajinan serta IKM logam mesin

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

Menstimulir pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menyerap tenaga dan menekan angka pengangguran kerja serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

Sasaran Pelaksanaan kegiatan yaitu UKM/IKM/Pelaku usaha Industri Kerajinan, Sandang, Aneka dan Kerajinan

~ Verifikasi dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan WUB

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

- Untuk memastikan kelompok usaha yang telah memasukkan proposal permohonan bantuan modal usaha telah memenuhi persyaratan.
- Pengembangan industri kerajinan daerah yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing

~ Pameran dan Rakernas Dekranas

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

- Mengikuti Pameran Produk Kerajinan Nusantara “Kriya Nusa 2024” di Jakarta dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) DEKRANAS Tahun 2024.
- Tujuan Pameran Kriyanusa 2024 yaitu untuk memfasilitasi perajin dalam mempromosikan dan memasarkan hasil kerajinannya serta meningkatkan rasa cinta dan bangga masyarakat Indonesia akan produk kerajinan Indonesia, selain itu sebagai ajang pembelajaran bagi para perajin untuk memperhatikan produk-produk yang dipamerkan.

- Tujuan Rakernas DEKRANAS yaitu untuk menambah wawasan bagi DEKRANAS dan DEKRANASDA Provinsi/Kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan kepada IKM Kerajinan sehingga produk kerajinan yang dihasilkan para perajin lebih berkualitas, memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar nasional maupun Internasional.

Sasaran yaitu Pelaku industri kerajinan sebanyak 3 orang

~ Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

Meningkatkan kemampuan SDM IKM yang berdaya saing

Sasaran Pelaksanaan kegiatan yaitu semua pelaku industri kerajinan.

Kegiatan Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo meliputi:

- Hibah kepada Dekranasda Provinsi Gorontalo senilai Rp. 300.000.000,- Nomor NPHD 351/DKUPP/IV/2024 tanggal 25 April 2024
- Honor Tenaga Non ASN yang merupakan Penjaga Galeri dan Tenaga Administrasi Dekranasda sebanyak 2 orang

c. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Output kegiatan ini adalah :

~ Verifikasi, pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi Industri Kecil Menengah

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

- mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di Daerah;
- menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kabupaten;

- mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Pelaksanaan kegiatan

Terwujudnya IKM yang mandiri dan berdaya saing, maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kebijakan pembangunan bidang industri 2025 difokuskan pada meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian, dengan sasaran utamanya adalah meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah.

Untuk mendorong pembangunan sektor industri melalui Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), peningkatan daya saing akan berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi, Outcome dari program perizinan dan pendaftaran perusahaan ini adalah Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi dengan target 2 dokumen dan capaian 1 yaitu *Dokumen Surat keterangan asal dari* dari 5 (lima) perusahaan yaitu PT. Pabrik Gula Gorontalo, PT. Biomas Jaya Abadi, PT. Milenium Agro Selebes, PT. Seger Agro Nusantara.

Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API). Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

Indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal dengan target 9 dokumen, capaian 47 dokumen yaitu dokumen Surat Keterangan Asal.

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pendataan pengawasan monitoring dan evaluasi ekspor di pelabuhan dan identifikasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo

Tujuan Pelaksanaan kegiatan :

- Pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor di kabupaten/kota
- Tersusunnya data pelaku usaha/eksportir yang menggunakan SKA dan identifikasi permasalahan eksportir terhadap penggunaan aplikasi SKA

Adapun realisasi export tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.8
Rekap Realisasi Ekspor Berdasarkan Komoditi
Selang Bulan Januari – Desember 2024

NO	JENIS KOMODITI	JUMLAH KOMODITI (KG)	NILAI EKSPOR (USD)	NEGARA TUJUAN	EKSPORTIR
1	MOLASES	32.634.272	5.496.316,65	KOREA	PT. PABRIK GULA GORONTALO
2	WOOD PELET	186.815.057	25.587.390,69	KOREASELATAN, JEPANG	PT. BIOMAS JAYA ABADI
3	SANTAN BEKU	473.503	473.503	CINA	PT. MILENIUM AGRO SELEBES
4	MINYAK MENTAH	179.205	157.637,00	CINA	PT. MILENIUM AGRO SELEBES
5	KELAPA PARUT	6.947.162	12.005.749,50	EROPA, CHINA, SAUDI ARABIA	
6	JAGUNG	32.900.000	9.120.637,50	FILIPINA	PT. SEGER AGRO NUSANTARA
7	IKAN	38.649,64	123.097,51	SINGAPURA MALAYSIA, JEPANG	
8	KEPITING	450,1	3.000,60	SINGAPURA, JEPANG	
	J U M L A H	259.988.299	52.967.332,45		

Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Outcome dari program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting ini adalah Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan

Pokok dan Barang Penting dengan target 28 Laporan, Capaian 43 Laporan yaitu 12 Laporan pemantauan harga dan 31 laporan pelaksanaan Operasi pasar

Pelaksanaan Program :

Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

+ Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota

Pelaksanaan sub kegiatan :

1. Pemantauan, Pengumpulan, dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting yang dilaporkan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)

Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan harga barang pokok dan barang penting bertujuan untuk:

- Mengetahui perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting secara periodik;
- Mengantisipasi terjadinya kondisi yang mengganggu kegiatan perdagangan nasional, yang meliputi gangguan pasokan dan/atau kondisi harga barang pokok dan/atau barang penting berada diatas harga acuan atau dibawah harga acuan;
- Mengetahui tingkat disparitas harga antar waktu dan antar wilayah;
- Bahan masukan untuk perumusan kebijakan pengadaan dan distribusi barang pokok dan barang penting dalam rangka stabilisasi harga.

Pelaksanaan pemantauan harga tidak terlepas dari permasalahan teknis dan non teknis, seperti adanya perbedaan harga antara petugas pemantau harga di kabupaten kota dan provinsi terhadap pasar pantauan yang sama.

2. Pemantauan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menyambut Ramadhan dan Idul Fitri

Pemantauan ketersediaan dan stok barang kebutuhan jelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445H/2024M dilaksanakan tanggal 5 April 2024 di tiga gudang distributor yakni gudang PT Awet Sarana Sukses, PT Cipta Langgeng Mitra Sukses, dan PT Manggala Utama Distrindo. Dua gudang lainnya yakni di Hypermart Gorontalo dan gudang Bulog Sub Divre Gorontalo.

Berdasarkan peninjauan tercatat stok beras ada 850 ton, gula 920 ton. Minyak goreng 170 ton dan terigu 131 ton. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dengan harga yang stabil.

3. Honorarium pengolah data harga dan informasi harga barang pokok dan barang penting

 Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Output kegiatan ini adalah :

a. Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi tahun 2024 yang dilaksanakan 31 kali di kabupaten kota se Provinsi Gorontalo, dengan jumlah penerima 35.600 penerima.

Kegiatan fasilitasi Operasi Pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) wilayah Gorontalo, dengan menyediakan produk antara lain Beras, Gula Pasir, Minyak

Goreng, dan Terigu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, utamanya Komoditi Beras, dengan pertimbangan harga beras yang terus meningkat, tidak diimbangi dengan pasokan yang mulai berkurang, ditambah peningkatan permintaan menjelang bulan Ramadhan 1445.

Kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya wilayah yang masuk dalam objek pantauan perhitungan inflasi daerah, dimana kegiatan ini akan turut mempengaruhi perhitungan inflasi nasional, yang meliputi wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Sasaran Operasi Pasar adalah masyarakat umum, dan lokasi pelaksanaannya bertempat di pasar tradisional, yang buka secara mingguan, sesuai dengan jadwalnya masing-masing.

Lokasi kegiatan Operasi Pasar di fokuskan di 3(tiga) wilayah, antara lain : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Lebih spesifik lagi Operasi Pasar menyasar pada masyarakat yang berbelanja di Pasar Tradisional mingguan, sesuai dengan jadwalnya masing-masing, mulai dari Pukul 07.00 Wita sampai dengan selesai.

Masyarakat diberikan kesempatan berbelanja sesuai dengan antriannya, dan dibatasi untuk setiap warga hanya dapat berbelanja maksimal 1 item/ orang. Dalam giat ini, BULOG menyediakan produk beras SPHP ukuran 5 kg, dijual dengan harga Rp. 10.400/kg, Gula Pasir dijual dengan harga Rp. 18.000/kg, Minyak Goreng dijual dengan harga Rp. 14.000/liter, dan terigu dijual dengan harga Rp11.000/kg. Setiap hari OP dilaksanakan di 2(dua) lokasi pasar tradisional, dan terbatas hanya dapat melayani untuk 200(Dua Ratus) warga masyarakat.

b. Pasar Murah Bersubsidi

Pelaksanaan program dan kegiatan pasar barang kebutuhan pokok bersubsidi atau yang juga dikenal oleh masyarakat

dengan sebutan Pasar Murah Bersubsidi, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyediakan dan menjual komoditi yang turut mempengaruhi inflasi yaitu:

- Beras kemasan 5 Kg dijual dengan harga Rp.25.000 atau @Rp.5.000/Kg;
- Gula Pasir kemasan 1 Kg dijual Rp.10.000/Kg.
- Minyak Goreng kemasan botol 1 liter dijual Rp.10.000/Liter;
- Telur kemasan 10 butir dijual Rp.10.000/pack atau @Rp.1.000/butir
- Cabai Rawit dikemas dalam tas 0,5 Kg atau 0,25 Kg dijual Rp.10.000
- Bawang Merah dikemas dalam tas 0,5 Kg dijual Rp.10.000/0,5 Kg
- Bawang Putih dikemas dalam tas 0,5 Kg dijual Rp.10.000/0,5 Kg ;
- Ayam Broiler dikemas dalam tas 1 Ekor dijual Rp 20.000
- Ikan Tuna dikemas dalam *vacum seal* 0,5 Kg dijual Rp.20.000/0,5 Kg

c. Pelaksanaan Intervensi Pasar terhadap Komoditi Beras di Pasaran

Yaitu subsidi harga terhadap komoditi beras bagi para pedagang pengecer beras di Pasar Sentral Kota Gorontalo dan Pasar Kayubulan Kabupaten Gorontalo mengingat harga beras di pasaran mencapai Rp. 17.000.-18.000/kg dan Rp. 14.000.-15.500/liter.;

Dalam upaya stabilisasi harga barang dan menyiapkan ketersediaan barang pokok yang cukup terjangkau bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Suci Ramadhan 1445 H / 2024 (Hari Besar Keagamaan Nasional/HBKN), serta mempertimbangkan harga beras di pasaran yang masih tinggi dan sebagai tindaklanjut terhadap

Hasil Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo tanggal 14 Maret 2024 guna stabilitas harga dan pasokan komoditas beras maka upaya dan langkah konkrit yang diputuskan pada pertemuan dimaksud untuk stabilisasi harga, pengendalian inflasi, dan pemenuhan barang kebutuhan pokok

Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor, Outcome dari program *Program Pengembangan Ekspor* adalah Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor dengan target 7 Komoditi, dan capaian 8 Komoditi molases, wood pelet, santan beku, minyak mentah, kelapa parut, jagung, ikan, kepiting.

Untuk capaian komoditi unggulan yang diekspor diperoleh berdasarkan dokumen Surat Keterangan Asal dan BPS Provinsi Gorontalo, Adapun untuk pelaksanaan kegiatan pendukung tidak dapat dilaksanakan karena belum mendapat porsi anggaran (keterbatasan fiskal daerah)

Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen, Outcome dari program *Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen* ini adalah Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen target 7 Dokumen, Capaian 7 Dokumen.

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain sidang BPSK, honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK

Penyelesaian Sengketa Konsumen dilaksanakan bila ada pengaduan konsumen dan apabila terindikasi akan merugikan konsumen misalnya ada promo penjualan, klausula baku yang

akan merugikan konsumen, penjualan barang yang tidak sesuai ataupun merugikan konsumen dan lain-lain sesuai peraturan perlindungan Konsumen maka penyelesaian sengketa konsumenn di laksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan juga Oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sasaran Pelaksanaan kegiatan Untuk melindungi Konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- b. Jumlah Monitoring dan evaluasi BPSK di Kabupaten/Kota
- c. Jumlah Pengaduan Konsumen Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebanyak 268 Kasus pengaduan, dan yang diselesaikan 253 kasus antara lain tentang Pengaduan Klausula Baku, Pengaduan permasalahan pembiayaan, liter/timbangan, penjualan LPG diatas harga Het, penjualan makanan/minuman ditoko-toko (diserahkan ke BPOM Kabupaten/Kota/pembinaan). Harga yang tidak bersesuaian dengan pembelian
- d. Pengaduan Konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai ketentuan yang berlaku :
 - BPSK Kota Gorontalo, 40 kasus yang ditangani dan penyelesaian sengketa secara mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus klausula baku/pembiayaan
 - BPSK Kabupaten Gorontalo ditahun 2024 jumlah kasus 34, yang diselesaikan melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus klausula baku/pembiayaan
 - BPSK Kabupaten Boalemo, ditahun 2024 jumlah kasus 108, yang diselesaikam melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus klausula baku/pembiayaan/PLN
 - BPSK Kabupaten Bone Bolango ditahun 2024 jumlah kasus klausula baku/pembiayaan 29 yang diterima

- BPSK Kabupaten Pohuwato ditahun 2024 jumlah kasus yang ditangani 33 kasus, yang diselesaikan melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus kausula baku/pembiayaan
- Kabupaten Gorontalo Utara, ditahun 2024 jumlah kasus 24 yang diterima dan diselesaikan melalui konsiliasi-mediiasi-arbitrase. Jenis kasus kausula baku/pembiayaan
- Provinsi Gorontalo, terdiri atas 29 kasus antara lain 5 kasus liter/timbangan (pasar tradisional/toko), 8 kasus LPG dijual diatas harga HET, 6 kasus makanan dan minuman yang sudah berjamur. 10 kasus pembelian yang harganya tidak bersesuaian, Penyelesaian kasus ini melalui pembinaan/mediasi.

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk

Indikator kinerja adalah Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau dengan target 3 komoditi

Untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat porsi anggaran dampak keterbatasan fiskal daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 164/MPP/KEP/6/1996 Tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu. Dimana terdapat 4 (empat) Komoditi yaitu kopi, biji kakao, kelapa sawit dan lada putih.

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian

Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang, target 150 Dokumen capaian 141 Dokumen Laporan Hasil

Pengujian untuk 7 komoditi (jagung, beras, rumput laut, biji cacao, kopi, VCO, lada putih). Ketidakcapaian atas target sub kegiatan ini disebabkan karena laboratorium belum memiliki peralatan untuk pengujian parameter tertentu (cemaran logam dalam minyak goreng, rumput laut, biji cacao) sesuai keinginan pelanggan dan tidak maksimalnya anggaran untuk pengambilan sampel

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pengambilan sampel (contoh uji) di kabupaten/kota.

Tujuannya adalah:

- Memenuhi permintaan pelanggan agar sampel yang diambil mewakili populasi
- Menjaga kompetensi analis

- b. Pengujian komoditi akreditasi dan non akreditasi serta pengujian produk pangan olahan.

Tujuannya adalah:

- Memenuhi kualitas/mutu barang/produk agar sesuai standar nasional maupun internasional

- c. Penyediaan bahan kimia serta bahan penunjang laboratorium

Tujuannya adalah:

- Menjamin agar pengujian dapat berlangsung dengan lancar dan baik.

- d. Partisipasi Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium

Tujuannya adalah:

- Memantau, menilai dan mengevaluasi kompetensi laboratorium
- Menilai dan mengevaluasi kompetensi personil/analis
- Memastikan keabsahan hasil pengujian

Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium yang diikuti meliputi:

- Uji Profisiensi Beras oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, Kementerian Pertanian

tanggal 12-16 Agustus 2024 dengan hasil sangat memuaskan (*satisfactory*).

- Uji profisiensi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan tanggal 22 Juli – 2 Agustus 2024, laporan hasil belum diterbitkan.
- Uji banding beras yang diselenggarakan oleh BPSMB Kalimantan Timur tanggal 24 Juni – 5 Juli 2024, dengan hasil sangat memuaskan (*satisfactory*).
- Uji banding biji kakao yang dilaksanakan oleh UPTD BPSMB Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung tanggal 11-18 November 2024, laporan hasil belum diterbitkan.
- Uji banding lada putih yang dilaksanakan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Timur tanggal 7 – 18 Oktober 2024, laporan hasil belum diterbitkan.

e. Penyediaan ATK seperti tinta printer, kertas dan bahan cetak/penggandaan

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi

Ouput dari kegiatan ini adalah Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan, target 3 sertifikat dan capaian sebanyak 4 sertifikat kesesuaian mutu (SKM) komoditi jagung serta belum ada sertifikat produk yang diterbitkan.

Output kegiatan ini adalah :

a. Pengawasan mutu produk di kabupaten/kota.

Tujuannya adalah:

- Menjamin keamanan keselamatan dan lingkungan dari produk
- Memastikan terwujudnya perlindungan konsumen

b. Reakreditasi Laboratorium oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Pelaksanaan setiap 5 tahun sekali.

Tujuannya adalah:

- Memastikan bahwa laboratorium pengujian memiliki kualitas yang memadai sesuai standar yang ditetapkan.
- Memberikan keyakinan kepada pelanggan/masyarakat bahwa layanan laboratorium memenuhi standar yang diterima, baik nasional dan internasional.

Sejak tahun 2020 pelaksanaan program peningkatan standarisasi mutu barang lebih diarahkan pada optimalisasi peran BPSMB dalam memfasilitasi pengujian dan sertifikasi mutu barang/produk unggulan Gorontalo, dan tidak hanya terbatas pada komoditi jagung dan rumput laut, juga telah dilakukan penambahan 2 lingkup pengujian akreditasi yakni biji kakao dan beras serta rencana perluasan ruang lingkup untuk komoditi kopi serta penambahan pelayanan pengujian lainnya

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi dengan target 12 laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi dengan capaian 100 % yaitu 12 laporan pengawasan yang dilaksanakan di Kabupaten/kota.

Output kegiatan :

- a. Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan Pengawasan Perdagangan, Lokasi Pengawasan se Provinsi Gorontalo yaitu terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yakni Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten

Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan Pengawasan Perdagangan dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN)

Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas kabupaten/Kota dan lintas sektoral untuk melakukan pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, dan pengawasan kegiatan perdagangan baik ditingkat distributor maupun pengecer (toko-toko, pedagang-pedagang pasar tradisional, Swalayan, supermarket minimarket dan kios-kios) dengan tujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kuantitas barang beredar dan jasa serta memperkuat daya saing produk dalam negeri sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan

1. Untuk Barang :

- a. Standar
- b. Label dalam bahasa Indonesia
- c. Petunjuk Penggunaan
- d. Jaminan Layanan Purna Jual
- e. Cara Menjual
- f. Pengiklanan
- g. Kalusula Baku

2. Untuk Jasa :

- a. Standar
- b. Jaminan dan/ataugaransi yang di sepakati dan/atau di perjanjikan
- c. Kalusula Baku

3. Untuk Pengawasan Perdagangan Meliputi;

- a. Perizinan di bidang perdagangan

- b. Perdagangan Barang yang diawasi, di larang dan/atau diatur
- c. Distribusi
- d. Pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan K3L (keamanan, keselamatan, Kesehatan dan lingkungan hidup)
- e. Pemberlakuan SNI kualifikasi secara wajib
- f. Pendaftaran Gudang
- g. Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan/atau penting
- h. Perdagangan melalui sistem elektronik

Hasil Pengawasan barang Beredar dan atau/Jasa :

- 1. Terdapatnya Besi, celokan, kabel, kipas angin yang belum sesuai dengan Standar Nasional dan masih terdapatnya barang yang tidak memiliki label harga pada barang yang diperdagangkan.
- 2. Masih banyak terdapat barang-barang kadaluarsa yang bercampur dengan barang-barang yang masih layak di konsumsi, berupa Biskuit, minuman dan bahan untuk pembuatan kue terdapat pada gudang-gudang dan penyelesaiannya di dilaporkan ke BPOM dan diselesaikan oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Pengawasan Perdagangan antara lain :

- 1. Distribusi
 - a. Pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi
 - Pola Distribusi dari Produsen
 - Distributor, Agen ke Pengecer.
 - Distribusi Barang
 - b. Distribusi barang yang dilarang, diawasi, dan diatur.
 - Minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gula rafinasi, barang berbahaya.

- c. Pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan penting.
2. Perijinan
 - Gudang-gudang (Tanda daftar Gudang, Siup, TDP, TDPUD, SIUP-MB)
3. Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
 - Pasar rakyat
 - Pusat-pusat perbelanjaan
 - Toko swalayan
 - Gudang
 - Sarana perdagangan lainnya

Hasil Pengawasan

1. Masih terdapatnya penjualan minyak kita yang diatas harga Het misalnya di pasar-pasar tradisional
2. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak mempunyai tanda daftar gudang
3. Terdapatnya minuman beralkohol yang kadarnya 4.5% masih di jual di toko-toko tidak mempunyai ijin
4. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak sesuai dengan peruntukannya
5. Distributor Minuman beralkohol yang izinnya sudah menghampiri (dalam proses penegakan Hukum oleh kepolisian)
6. Banyak sub pangkalan-pangkalan Gas LPG yang Nakal menjual Gas LPG sudah melebihi Harga HET.

Persentase Peningkatan Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen Asn, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Perencanaan, Penatausahaan Keuangan Dan Pengawasan,

Pada program ini terdiri atas 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

❖ **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 dokumen). Di tahun 2024 telah dihasilkan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 7 Dokumen perencanaan yaitu Dokumen renja, renstra, RAK, RKA, KAK, RAB, SIRUP

Output dari kegiatan ini adalah :

- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulan II dan triwulan III Bidang Koperasi UMKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Boalemo
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah pendampingan pelaksanaan program kegiatan (standar kompetensi, pelayanan prima, pengelolaan ketersediaan barang)

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (6 laporan)

Di tahun 2024 telah dihasilkan 8 Dokumen Monitoring dan Evaluasi yaitu Dokumen Rencana Aksi, LKPJ, LPPD, laporan evaluasi renja per triwulan, E-Monev, Lakip, Laporan Tahunan (LAPKIN APBN), laporan tahunan APBD masing-masing bidang

Output dari kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan rapat evaluasi program kegiatan
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah monev stimulan bantuan bagi UMKM tahun 2023, Monev bantuan hibah koperasi tahun 2024, Monev kinerja BPSK di Provinsi Gorontalo, monev UKM yang berdaya saing, Pendampingan Pelaksanaan Program/Kegiatan (pemberdayaan koperasi, pelaksanaan pasar murah)

❖ **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. *Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (79 orang/bulan).

b. *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*

Indikator Output Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 laporan capaian 100% dari target)

❖ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator output yaitu jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan sebanyak 87 orang

Di Tahun 2024 kegiatan ini tidak mendapatkan porsi anggaran karena keterbatasan fiskal daerah.

❖ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator output yaitu Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (target 31 paket, capaian 18 paket atau 58% karena keterbatasan anggaran)

Output kegiatan ini adalah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perawatan berupa penyediaan bahan bakar dan pelumas, suku cadang kendaraan, sewa bangunan Gedung Dekranasa di bandara Jalaluddin, jasa konsultasi perencanaan arsitektur gedung kantor Dinas Kumperindag, pemeliharaan kendaraan dinas bermotor, pemeliharaan alat kantor dan pemeliharaan computer).

❖ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 laporan).

Pada tahun 2024 program pelayanan administrasi perkantoran diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi secara cepat, efisien dan terukur, sehingga bisa menciptakan kepastian waktu dan kejelasan prosedur pelayanan dalam rangka pelayanan publik. Sedangkan untuk program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD.

4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

✚ Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

- a. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) target 140 unit usaha, realisasi 43 unit usaha indikator Jumlah UKM yang berdaya saing tidak mencapai target (30,72%). Ketidakcapaian atas target ini disebabkan kurang optimalnya anggaran untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan fasilitasi terhadap UKM yang berpotensi. capaian atas realisasi ini diperoleh dari UKM yang telah mengikuti kurasi produk yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan Bank Indonesia
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan nya capaian 90,8% (target 87 orang, realisasi 79 orang) tidak mencapai target karena terdapat pegawai yang pensiun dan pindah tempat tugas
- c. Pada urusan Koperasi UKM terdapat 1 sub kegiatan yang tidak terpenuhi target kinerja karena tidak teranggarkan yaitu kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan

Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yaitu target 87 orang, realisasi 0 dengan indikator Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

- d. Pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana yang disediakan tidak mencapai target yang ditetapkan (58,07%) dari target 31 paket dengan realisasi 18 paket karena ditahun 2024 tidak teranggarkan belanja modal disebabkan keterbatasan anggaran sehingga mengurangi jumlah paket sarana prasarana yang disediakan
- e. Program pengendalian izin usaha industri tidak mencapai target karena keterbatasan fiskal daerah sehingga tidak teranggarkan ditahun 2024
- f. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional, target 12 dokumen dengan indikator Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri capaian 0 karena keterbatasan fiskal daerah maka program ini tidak teranggarkan ditahun 2024
- g. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, indikator kinerja Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi dengan target 2 dokumen tidak mencapai target karena 1 sub kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan target capaian 1 (satu) dokumen tidak dilaksanakan karena bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. capaian 1 dokumen yaitu Dokumen Surat keterangan asal dari dari 5 (lima) perusahaan yaitu PT. Pabrik Gula Gorontalo, PT. Biomas Jaya Abadi, PT. Milenium Agro Selebes, PT. Seger Agro Nusantara
- h. Program Pengembangan export , Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu)

Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi karena keterbatasan fiskal daerah maka program ini tidak teranggarkan ditahun 2024

- i. Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida Tingkat daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya indicator Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya dengan capaian 0 dari target 12 laporan karena keterbatasan fiskal daerah maka program ini tidak teranggarkan ditahun 2024.
- j. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota, indikator Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk capaian 94,78%

Penyebab Terpenuhinya/melebihi Target Kinerja Program/ Kegiatan

Urusan Koperasi & UMKM

Dalam mencapai target kegiatan pada urusan koperasi ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target tersebut antara lain :

- a. Makin baiknya koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan kabupaten/kota
- b. Meningkatnya kesadaran pengurus dan pengawas untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan manajemen usaha koperasi, yang ditandai dengan makin meningkatnya jumlah koperasi yang menerapkan manajemen usaha yang baik dan sistem akuntansi serta komputerisasi dan internet (IT).
- c. Makin banyaknya KUMKM yang memiliki usaha yang bankable (layak dari sisi usaha untuk didanai bank) sehingga kepercayaan bank terhadap KUMKM juga meningkat.

- d. Adanya dukungan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana dekonstrasi sehingga dapat membantu pencapaian target kegiatan tahun anggaran 2024

Perkembangan UMKM ini harus terus dibarengi dengan berbagai upaya untuk peningkatan usaha para pelaku usaha UMKM, karena masih ada beberapa faktor yang harus diupayakan agar pencapaian target program akan lebih maksimal antara lain :

- a. Peningkatan peran pendamping pusat layanan usaha terpadu (PLUT) dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan bagi UKM/IKM melalui Kelas Bisnis UMKM, pelatihan dan pendampingan secara online maupun offline serta menjadikan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menjadi pusat informasi dan konsultasi tentang berbagai aspek usaha, perizinan, peluang bisnis, regulasi terbaru dan lain-lain bagi pelaku usaha
- b. Dalam upaya pemulihan ekonomi dan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah menuntut Pemerintah untuk melaksanakan program-program yang sifatnya untuk mengintervensi UMKM seperti Pemberian bantuan bahan produksi kepada UMKM yang tepat sasaran dan bermanfaat menuju UMKM yang berdaya saing dan bertransformasi usaha.
- c. Peningkatan pemahaman pelaku usaha kecil untuk memformalkan usahanya melalui pengurusan perijinan, dimana hal ini merupakan salah satu persyaratan untuk bisa mengakses modal perbankan.
- d. Sinergitas program yang bersumber dari APBD dan APBN sangat dibutuhkan sehingga proses pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM di Provinsi Gorontalo tetap berjalan dengan baik dan maksimal.
- e. Evaluasi terhadap pemanfaatan stimulan bantuan bagi para pelaku UMKM dilakukan secara intensif

- f. Up-dating data UKM menjadi prioritas terhadap pengambilan keputusan/kebijakan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Tantangan kedepan dalam upaya mengembangkan koperasi dan UMKM adalah penguatan peran KUKM, dan pelaku usaha lainnya, memacu pertumbuhan investasi didaerah (optimalisasi pelaksanaan PERDA tentang kemudahan investasi; peningkatan peran perbankan selaku *agent of development* guna penguatan modal usaha; kerjasama antar daerah untuk promosi dan pemasaran produk dan peningkatan kerjasama perdagangan regional, nasional dan internasional.

Urusan Industri

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja hasil tersebut antara lain:

- a. Dukungan dana dekonsentrasi dalam pembinaan dan pengembangan IKM
- b. Koordinasi antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota terjalin dengan baik, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Bantuan yang diberikan diharapkan tepat sasaran dan bermanfaat.

Urusan Perdagangan

Faktor-faktor yang mendukung tingkat pencapaian target kinerja tersebut antara lain :

- a. Koordinasi lintas sektor dengan SKPD terkait baik provinsi maupun kabupaten/kota serta dukungan pemerintah daerah untuk tetap mendorong semua pihak dalam meningkatkan ekspor Gorontalo hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian kerja sama MOU peningkatan eksport antara Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, Bea Cukai, Pelindo.
- b. Makin efektifnya koordinasi lintas instansi dan kabupaten/kota serta instansi vertikal dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di daerah.
- c. Penguatan sinergi lintas sektor dalam mengatasi tantangan inflasi.

BPSMB

Beberapa hal yang menunjang pencapaian target kinerja BPSMB ini antara lain

- a. Makin efektifnya penyebaran informasi fungsi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan sosialisasi standar mutu serta pentingnya sertifikasi mutu barang kepada pelaku usaha, khususnya eksportir dan pedagang antar pulau.
- b. Terakreditasinya laboratorium BPSMB pada awal 2011 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sehingga hingga saat ini laboratorium BPSMB terus mempertahankan akreditasi laboratorium sehingga bisa menerbitkan sertifikat mutu barang sebagai salah satu dokumen yang dipersyaratkan pada barang ekspor serta menjamin mutu komoditi/produk.
- c. Ketersediaan Gedung Laboratorium walaupun belum sepenuhnya ditunjang dengan peralatan laboratorium yang optimal.

Sekretariat

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target kinerja program/kegiatan antara lain:

- a. Membaiknya kinerja Sekretariat SKPD dalam mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pelayanan jasa administrasi perkantoran yang professional.
- b. Meningkatnya pembinaan terhadap PNS yang mendorong peningkatan disiplin dan budaya kerja kearah yang lebih baik.
- c. Pemanfaatan aplikasi SIREKA BMD dan E-BMD untuk pelaporan asset secara berkala tentang rencana kebutuhan barang inventaris, pemeliharaan barang inventaris kantor, pelaporan perubahan kondisi asset peralatan dan mesin, dll

5. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Dari pencapaian program Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2024 berdasarkan target program yang sudah direncanakan pada Renstra Dinas Kumperindag 2023-2026 terdapat faktor keberhasilan dan faktor kegagalan yang mempengaruhi pencapaian target adalah :

a. Faktor Keberhasilan

1. Faktor Eksternal

- Menjalin Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders (Pemerintah Daerah Setempat, masyarakat calon penerima stimulan bantuan dan lembaga/institusi terkait lainnya) sehingga diharapkan permasalahan, kendala dan hambatan dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku,
- Kemudahan pengurusan Izin berusaha dan akses permodalan KUKM

2. Faktor Internal

- Kesiapan rencana pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran misalnya untuk stimulan bantuan melalui tahapan verifikasi, validasi, hingga di tahapan penyaluran bantuan
- SDM di Dinas Kumperindag yang berusaha untuk bekerja optimal untuk melaksanakan program kegiatan sesuai target yang ditetapkan

b. Faktor Kegagalan Pada pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kumperindag Tahun 2024 terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian, yaitu:

- Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi UKM khususnya dalam penerapan regulasi perkoperasian yang diindikasikan oleh besarnya koperasi yang tidak aktif sehingga Secara umum kualitas SDM pengurus dan pengawas koperasi perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, pemasaran hasil dan pemanfaatan teknologi informasi.

- Koordinasi antar sektor dalam hal pembinaan pengembangan dan pemberdayaan KUKM belum optimal, SDM pengelola koperasi sangat terbatas menyebabkan realisasi pelaksanaan RAT koperasi masih sangat rendah,
- Masih tingginya jumlah koperasi tidak aktif mengakibatkan peran koperasi sebagai soko guru perekonomian menjadi kurang optimal.
- Tidak maksimalnya pelaksanaan program kegiatan, seperti fasilitasi bantuan bagi IKM, pembinaan pengembangan IKM dan pengawasan perizinan, pencapaian target promosi komoditi unggulan Provinsi Gorontalo serta pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan karena dukungan anggaran yang terbatas
- Kemampuan teknis dan kualitas SDM yang terbatas dalam mengembangkan usaha industri kecil menengah, mengembangkan desain produk serta kemasan IKM.
- Terhambatnya proses pengadaan bantuan bagi IKM karena proposal yang diajukan dari masing-masing calon penerima (melalui aspirasi DPR) belum memenuhi persyaratan yang sesuai Juknis sehingga harus dilakukan verifikasi berulang.
- Pemahaman dan pengetahuan eksportir tentang prosedur, mekanisme dan standarisasi mutu barang ekspor-impor perlu terus ditingkatkan, seiring dengan dinamika kebijakan ekspor-impor baik nasional maupun negara tujuan ekspor.
- Terbatasnya jaringan kerjasama antara para pelaku usaha UKM sebagai calon eksportir di daerah.
- sarana dan prasarana pengawasan barang beredar masih sangat terbatas, seperti belum adanya kendaraan operasional khusus pengawasan barang dan belum maksimalnya kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat kabupaten/kota yang menyebabkan belum optimalnya

pelaksanaan fungsi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di daerah.

- Minimnya sarana dan prasarana laboratorium pengujian mutu, sehingga pelayanan kepada pelanggan/konsumen tidak maksimal. UPTD BPSMB belum sepenuhnya mampu melaksanakan layanan pengujian dan sertifikasi mutu barang pada beberapa komoditi karena belum memiliki peralatan yang memadai seperti alat analisis laboratorium berupa Spektrofotometer UV, Atomic Absorption Spectrophotometer/AAS dan High Performance Liquid Chromatography/HPLC (kromatografi cair untuk pengujian toksin pada komoditi pangan, pengujian kandungan nutrisi/vitamin produk pangan olahan) serta mengakibatkan sulitnya tenaga fungsional Penguji Mutu Barang untuk memperoleh angka kredit/poin pengujian sebagai syarat kenaikan jabatan fungsional.
- Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap ketentuan peraturan yang berlaku serta keterbatasan aparat pemda sebagai pengawas barang dan jasa serta pengawas perdagangan, begitupun Pengawasan Barang beredar dan/atau jasa serta Perdagangan harus lebih dioptimalkan dalam hal pembinaan sebab masih banyak pelaku usaha yang belum memahami peraturan-peraturan berlaku
- Gedung kantor yang memerlukan perbaikan/renovasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kumperindag.
- Belum adanya jabatan fungsional yang sesuai untuk bidang pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil (KUKM)

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah:

- Penganggaran program/kegiatan yang lebih optimal sehingga pelaksanaan program/kegiatan lebih maksimal sesuai target yang ditetapkan.
- Diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta swasta dalam berbagai kesempatan termasuk forum Musrenbang untuk mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan dan kewenangan terhadap kegiatan-kegiatan prioritas.
- melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan program yang dilaksanakan di masyarakat serta untuk perencanaan program ditahun berikutnya.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan peningkatan kemampuan SDM dan daya saing para pelaku usaha

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja hasil program dan output kegiatan tahun 2024 dan progress 2025 diuraikan dalam *Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo* sebagai berikut.



Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Provinsi Gorontalo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Renja OPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100 %	100%	100	%	100	%	100%	100	%	100 %	100
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10	Dokumen	15	Dokumen	150%	10	Dokumen	10 Dokumen	100
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4	Dokumen	7	Dokumen	175%	4	Dokumen	4 Dokumen	100
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Laporan	6 Laporan	6	Dokumen	8	Dokumen	133%	6	Dokumen	6 Dokumen	100
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan	87 Orang	87 Orang	87	Orang	79	Orang	91%	79	Orang	79 Orang	100
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/ Bulan	87 Orang/ Bulan	87	Orang	79	Orang	91%	79	Orang	79 Orang	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Renja OPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1 Laporan	100
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	87 Orang	124 Orang	-	Orang	-	Orang	0%	79	Orang	79 Orang	100
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	87 Orang	124 Orang	-	Orang	-	Orang	0%	79	Orang	79 Orang	100
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	30 paket	30 paket	31	Paket	18	Paket	58%	30	Paket	30 Paket	100
2.17.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Paket	30 paket	31	Paket	18	Paket	58%	30	Paket	30 Paket	100
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1 Laporan	100
2.17.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1 Laporan	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Renja OPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	20 Koperasi	22 Koperasi	20	Koperasi	20	Koperasi	100%	20	Koperasi	20 Koperasi	100
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	20 Dokumen	22 Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	100%	20	Dokumen	20 Dokumen	100
2.17.03.1.01.02	Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan Perundang- undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan tersedianya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	20 Unit Usaha	22 Unit Usaha	20	Dokumen	20	Dokumen	100%	20	Dokumen	20 Dokumen	100
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390 Orang	400 Orang	390	Orang	475	Orang	122%	390	Orang	390 Orang	100
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	390 Orang	400 Orang	390	Orang	475	Orang	122%	390	Orang	390 Orang	100
2.17.05.1.01.01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	390 Orang	400 Orang	390	Orang	475	Orang	122%	390	Orang	390 Orang	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Renja OPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
	kapasitas dan kompetensi SDM koperasi												
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	25 Unit Usaha	60 Unit Usaha	20	Unit Usaha	20	Unit Usaha	100%	25	Unit Usaha	25 Unit Usaha	100
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	25 Unit Usaha	60 Unit Usaha	20	Unit Usaha	20	Unit Usaha	100%	25	Unit Usaha	25 Unit Usaha	100
2.17.06.1.01.02	Peningkatan produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	25 Unit Usaha	60 Unit Usaha	20	Unit Usaha	20	Unit Usaha	100%	25	Unit Usaha	25 Unit Usaha	100
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	160 Unit Usaha	50 Unit Usaha	140	Unit Usaha	43	Unit Usaha	31%	160	Unit Usaha	160 Unit Usaha	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Renja OPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	300 Unit Usaha	228	250	Unit Usaha	525	Unit Usaha	210%	300	Unit Usaha	300 Unit Usaha	100
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	Jumlah unit usaha UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	300 Unit Usaha	228 Unit Usaha	250	Unit Usaha	525	Unit Usaha	210%	300	Unit Usaha	300 Unit Usaha	100
2.17.07.1.01.02	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UMKM dan kewirausahaan	358 Orang	278 orang	318	Orang	525	Orang	165%	358	Orang	358 Orang	100
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	50 Unit Usaha	50 unit usaha	40	Unit Usaha	52	Unit Usaha	130%	50	Unit Usaha	50 Unit Usaha	100
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah	50 Unit Usaha	50 unit usaha	40	Unit Usaha	50	Unit Usaha	125%	50	Unit Usaha	50 Unit Usaha	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Renja OPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.08.1.01.01	Produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	50 Unit Usaha	9.273 unit usaha	14.303	Unit Usaha	14.303	Unit Usaha	100%	50	Unit Usaha	50 Unit Usaha	100
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi dan diawasi	2 Dokumen	8 dokumen	1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	1 Dok	100
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	10 Dokumen	65 dokumen	9	Dok	47	Dok	522%	11	Dok	11 Dok	100
3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	10 Dokumen	65 dokumen	9	Dok	47	Dok	522%	11	Dok	11 Dok	100
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting	28 Laporan	28 Laporan	28	Laporan	43	Laporan	154%	28	Laporan	16 Laporan	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Renja OPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.04.1.02	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	16 Laporan	16 laporan	16	Laporan	43	Laporan	269%	16	Laporan	16 Laporan	100
3.30.04.1.02.01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota	12 Laporan	12 laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12 Laporan	100
3.30.04.1.02.02	Operasi pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	4 Laporan	4 laporan	4	Laporan	31	Laporan	775%	4	Laporan	4 Laporan	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Renja OPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	12 Laporan	12 laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	12	Laporan	12 Laporan	100
3.30.04.1.03.03	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	12 Laporan	12 laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	12	Laporan	12 Laporan	100
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	8 Komoditi	7 Komoditi	0	Komoditi	0	Komoditi	0%	8	Komoditi	8 Komoditi	100
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	8 Pelaku Usaha	7 Pelaku usaha	0	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0%	8	Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	100
3.30.05.1.01.03	Misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	8 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0%	8	Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Renja OPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	9 Dokumen	5 Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100%	9	Dokumen	9 Dokumen	100
3.30.06.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kab/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	12 Kasus	238 Kasus	11	Kasus	297	Kasus	2700%	12	Kasus	12 Kasus	100
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen	Jumlah badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang aktif	6 BPSK	6 BPSK	6	BPSK	6	BPSK	100%	6	BPSK	6 BPSK	100
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	204 Dokumen	566 Dokumen	153	Dokumen	145	Dokumen	95%	204	Dokumen	204 Dokumen	100
3.30.06.1.02.01	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial Yang Dipantau	3 Komoditi	4 Komoditi	3	Komoditi	0	Komoditi	0%	3	Komoditi	3 Komoditi	100
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang	200 Dokumen	209 Dokumen	150	Dokumen	141	Dokumen	94%	200	Dokumen	150 Dokumen	100
3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah sertifikasi produk yang diterbitkan	4 Sertifikat	9 Sertifikat	3	Sertifikat	4	Sertifikat	133%	4	Sertifikat	2 Sertifikat	100
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	50 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	40	Pelaku Usaha	45	Pelaku Usaha	113%	50	Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Renja OPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.06.1.03.01	Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen	Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	12 Laporan	12 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12 Laporan	100
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36 Dokumen	36 Dokumen	36	Dokumen	36	Dokumen	100%	36	Dokumen	36 Dokumen	100
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	36 Dokumen	36 Dokumen	36	Dokumen	36	Dokumen	100%	36	Dokumen	36 Dokumen	100
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	12 Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	12 Dokumen	100
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	12 Dokumen	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Renja OPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industry	12 Dokumen	12 Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	12 Dokumen	100
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0 Dokumen	0
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0 Dokumen	0



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Renja OPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan risiko usaha menengah- tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi : 1)Industri besar; 2)Industri kecil dan industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, 3)Kawasan Industri, dan perizinan perluasan kawasan Industri yang merupakan PMDN yang berlokasi lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0 Dokumen	0
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	12 Dokumen	12 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0 Dokumen	0



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Renja OPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	12 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0 Dokumen	0
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	12 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0 Dokumen	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kumperindag

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang sudah ditentukan terhadap IKK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jenis indikator yang dikaji, sesuai tugas dan fungsi Dinas Kumeprindag, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan, dan dampak yang ditimbulkan akibat kinerja pelayanan tersebut. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas dan fungsi. Selanjutnya tolak ukur dan Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan RPD dan RKPD. Penentuan indikator serta capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan yang ditetapkan. Penetapan tolak ukur dan Indikator Kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Gorontalo yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja Utama ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya yang berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD dengan Rencana Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo serta wajib

melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Adapun Indikator Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kumperindag Tahun 2024
Provinsi Gorontalo

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	Target 2024
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kumperindag	Nilai SAKIP	Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja+ Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	74,68
2	Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)	Jumlah Koperasi Berkualitas	Koperasi Sehat Tahun-n	20
		Jumlah UKM yang berdaya saing	UKM naik kelas Tahun-n	70
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	$\frac{(\text{Jumlah Industri (n)} - \text{Jumlah Industri (n1)})}{\text{Jumlah Industri (n - 1)}} \times 100\%$	0,84%
	Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Tahun-n	\$14.807.701

1. Jumlah Koperasi Berkualitas

Jumlah koperasi berkualitas adalah jumlah koperasi sehat di tahun n (2024). Adapun target jumlah koperasi berkualitas tahun 2024 sebesar 20 UKM dengan realisasi sebesar 20 UKM. Sehingga capaian jumlah koperasi berkualitas sebesar 100%.

Capaian indikator koperasi berkualitas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan. Dimana untuk koperasi berkualitas berdasarkan pemeringkatan. Aspek penilaian yaitu kelembagaan, usaha, keuangan, manfaat koperasi terhadap anggota, manfaat

koperasi terhadap masyarakat. Dengan hasil pemeringkatan sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas dan tidak berkualitas

2. Jumlah UKM yang Berdaya Saing

capaian jumlah UKM yang Berdaya saing 61,43% dengan realisasi 43 UKM dari target 70 UKM. kriterianya UMKM yang berdaya saing antara lain adanya peningkatan kualitas produk, legalitas usaha, peningkatan omzet dan aset, peningkatan jangkauan pemasaran, potensi sumber daya manusia. Realisasi UKM ini telah mengikuti kurasi produk yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan Bank Indonesia

3. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah, dengan realisasi sebesar 45,24% dari target 0,84%

Indikator kinerja urusan industri “Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah ” Tahun 2024 diperoleh dari :

$$\frac{(\text{Jumlah industri tahun } n - \text{jumlah industri thn } n-1)}{(\text{Jumlah Industri Tahun } n-1)} \times 100\%$$

Dimana :

Jumlah industri tahun 2024 = 13.260 IKM

Jumlah industri tahun 2023 = 13.210 IKM

* Jumlah IKM 2023 berdasarkan data SIIDIG per 18 Januari 2023 sejumlah 10.039 IKM (tercantum pada LKPJ 2023). Hasil updating per Januari 2024 sejumlah 13.210.

4. Jumlah Nilai Ekspor

Di tahun 2024 capaian sebesar 357,70%. Dari target \$14.807.701 dengan capaian \$52.967.332,45. Realisasi atas Jumlah Nilai Ekspor Tahun 2024 berjumlah \$52.967.332,45. Data realisasi diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Asal dan BPS Provinsi Gorontalo. Komoditi Export 2024 yaitu molases, wood pelet, santan beku, minyak mentah, kelapa parut, jagung, ikan, kepiting

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Analisis kinerja pelayanan SKPD dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sesuai target Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2023 – 2026 yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada *Tabel T-C.30*. Dari tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kumperindag terhadap target Renstra 2023-2026 dimana diharapkan capaian target dapat terpenuhi dan proyeksi pada tahun 2025 sampai 2027 dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.



*Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo*

No	INDIKATOR KINERJA	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET KINERJA SASARAN				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP			74,5	74,68	74,88	75,05	78,41	79,46	74,88	75,05	Mencapai target
2	Jumlah Koperasi Berkualitas			20	20	20	20	22	20	20	20	Mencapai target
	Jumlah UKM yang berdaya saing			60	70	80	90	50	43	80	90	Belum Mencapai target
3	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah			0,78%	0,84%	0,90%	0,95%	17,97	0,38%	0,90%	0,95%	Belum mencapai target
4	Jumlah Nilai Ekspor			\$14.102.573	\$14.807.701	\$15.548.086	\$16.325.490	\$37.959.205	\$52.967.332,45	\$15.548.086	\$16.325.490	Mencapai target

- *Capaian Target telah dijelaskan di Bab II*

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo dan Peraturan Gubernur Gorontalo No. 38 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pergub tersebut disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Kumperindag sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Kumperindag memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - d. koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Peridustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
 - f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Peridustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan
 - g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Peridustrian dan Perdagangan
-  Koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat -dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi dan sinergi program kegiatan dengan perangkat daerah kabupaten kota dengan kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, antara lain:

- a. Dinas Kumperindag kabupaten/kota dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan di kabupaten kota seperti pengawasan koperasi, pembinaan IKM/UKM, pelaksanaan operasi pasar, pengawasan barang beredar dl.
- b. Kemenkum HAM yaitu untuk penerbitan izin pendirian koperasi/penerbitan HAKI bagi pelaku usaha UKM/IKM
- c. Dinas Pariwisata dalam bentuk sinergi promosi produk UKM/IKM
- d. Bank Indonesia dalam bentuk sinergi promosi produk dan pemberdayaan serta pengembangan UKM/IKM,
- e. Bea cukai untuk Koordinasi dan pengawasan export import
- f. MUI untuk penrbitan sertifikat halal bagi pelaku usaha UKM/IKM
- g. Badan Amil Zakat Nasional dalam bentuk perjanjian kerjasama tentang penyaluran zakat maal program ekonomi produktif dan program kemanusiaan
- h. Komite Akreditasi Nasiona (KAN) untuk akreditasi Laboratorium UPTD BPSMB,
- i. LS Pro terkait penerbitan sertifikat produk

Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

- Rendahnya kualitas SDM Koperasi terhadap pengelolaan keuangan, manajemen & kewirausahaan koperasi
- Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
- Keterbatasan modal usaha yang menyebabkan banyaknya koperasi yang kesulitan berkembang
- Belum optimalnya pengawasan koperasi

- Belum optimalnya ketersediaan data UMKM
- Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.
- Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM
- Minim Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi (produksi, pemasaran dan keuangan) dan E-Commerce.
- Rendahnya Kualitas dan legalitas produk UMKM dan IKM :
 - Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha.
 - Kurangnya kesadaran akan manajemen mutu dan sertifikasi produk IKM.
 - Diversifikasi produk IKM masih rendah, sehingga daya saing terbatas.
- Rendahnya produktivitas IKM (SDM Industri Kecil Menengah dalam skill, manajemen usaha dan akses permodalan)
- Belum optimalnya pemanfaatan akses pemasaran produk IKM, baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional
- Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian Industri kecil, menengah dan besar
- Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
- Minimnya intensitas pengawasan barang beredar
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang standarisasi produk
- Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur ekspor
- Rendahnya intensitas kerja sama sektor perdagangan antar daerah
- Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen
- Minimnya sarana dan prasarana Laboratorium dan operasional BPSMB
- Terbatasnya Kapasitas Penguji Mutu Barang
- Minimnya ruang lingkup pengujian komoditi/produk yang terakreditasi
- Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD
- Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Dinas Kumperindag
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD.

- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

+ Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Dalam penerapan kebijakan pembangunan, perencanaan pembangunan menengah Provinsi Gorontalo disusun dalam bentuk dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan melalui Rancangan Peraturan Provinsi Gorontalo Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Gubernur Gorontalo telah menetapkan Visi pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 adalah **“Gorontalo Maju dan Sejahtera”** Visi tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu : Gorontalo Maju, adalah kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini yang diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

Gorontalo Sejahtera, yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Modal Manusia (IMM), Indeks Pembangunan Manusia, Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya masyarakat berbudaya, beriman dan bertaqwa dengan menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Gorontalo 2025-2029 tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yaitu :

1. Mengoptimalkan posisi strategis Gorontalo Terhadap IKN Nusantara untuk akselerasi pembangunan.

2. Melakukan akselerasi agar Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia.
3. Menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas
5. Menjadikan “Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Terkait dengan visi misi tersebut diatas, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan diproyeksikan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian misi ketiga yaitu Menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat antara lain melalui peningkatan kontribusi KUKM , nilai tambah dan daya saing produk industri unggulan daerah dalam mendukung perekonomian daerah.

Adapun terhadap capaian program nasional

- NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)

Penguatan kelembagaan koperasi dan pembinaan UMKM dilakukan sesuai NSPK dari Kemenkop dan UKM begitupun untuk Pengujian mutu komoditi yang terakreditasi mendukung standar nasional produk dan perlindungan konsumen

- SDGs (Sustainable Development Goals)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Kumperindag) memiliki tujuan yang sejalan dengan beberapa poin dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Berikut beberapa tujuan SDGs yang relevan dengan Dinas Koperindag:

- SDGs 2 – Tanpa Kelaparan

Monitoring ketersediaan pasokan dan harga bahan pokok/bahan penting dan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok/bahan penting sehingga dapat terjangkau bagi masyarakat.

- SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:

Dinas Koperindag bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan memperkuat struktur perekonomian daerah, melalui pembinaan usaha kecil, promosi produk lokal

Tujuan ini sejalan dengan SDGs 8 yang fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

- SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:

Dinas Koperindag memiliki tugas mengembangkan industri dan meningkatkan daya saing produk lokal, pengembangan produk unggulan daerah dan inovasi teknologi produksi. Tujuan ini sejalan dengan SDGs 9 yang antara lain fokus pada industri yang berkelanjutan.

- SDGs 12 : Konsumsi & Produksi Berkelanjutan

Berperan dalam Penerapan standar mutu dan sertifikasi produk sehingga mendukung perlindungan konsumen dan keberlanjutan usaha

- SDGs17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Dinas Koperindag dapat berperan dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Koperindag dapat berkontribusi pada beberapa target SDGs, seperti:

- Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri lokal
- Meningkatkan akses ke pasar dan informasi bagi usaha kecil dan menengah
- Meningkatkan kemampuan teknologi dan inovasi industri lokal
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Dengan demikian, Dinas Koperindag dapat berperan penting dalam mencapai tujuan SDGs dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam pengembangan Koperasi UKM adalah :

- a. Sumber daya manusia (SDM), terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional; Masih terbatasnya SDM Pembina Koperasi dalam hal pengawasan dan pembinaan, sehingga perlunya dukungan peningkatan SDM Bagi Pembina Koperasi.

- b. Kelembagaan, dari sisi kelembagaan belum berfungsinya perangkat organisasi koperasi antara sesama pengurus, pengawasan dan anggota koperasi terkait dengan tugas dan wewenang masing-masing.
- c. Proses pembentukan koperasi yang sudah tidak mewajibkan rekomendasi dari dinas teknis berakibat tumbuh suburnya koperasi yang tidak sehat dan kesulitan dalam pembinaan dan pengawasan serta kesulitan pengurusan izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait, sehingga menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis bisnis yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- d. Pembiayaan, perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
- e. Ketersediaan data umkm yang up-date dan akurat
- f. Produksi dan pemasaran, pada umumnya sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok, dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Tantangan dalam pengembangan Industri adalah :

- a. Keterampilan dan Sumber Daya Manusia : Keterbatasan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia dapat menghambat inovasi dan produktivitas industri.
- b. Sosial Masyarakat : Kesenjangan sosial dapat menghambat kegiatan pengembangan industri.
- c. Infrastruktur : Keterbatasan infrastruktur seperti transportasi, energi, dan teknologi informasi dapat mempengaruhi efisiensi dan daya saing industri.
- d. Regulasi dan Kebijakan: Regulasi yang tidak jelas atau tidak mendukung dapat menghambat pertumbuhan industri.

- e. Akses ke Pendanaan: Keterbatasan akses ke pendanaan atau modal dapat membatasi kemampuan industri untuk berkembang dan berinovasi.
- f. Persaingan Global : Persaingan dari industri di negara lain dapat menantang daya saing industri lokal.
- g. Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan : Meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan dan dampak lingkungan dapat menantang industri untuk beradaptasi dengan praktik yang lebih ramah lingkungan
- h. Ketersediaan data IKM yang up-date dan akurat

Tantangan dalam pengembangan Perdagangan dalam negeri dan luar negeri :

- a. Infrastruktur : Keterbatasan infrastruktur transportasi dan logistik seperti jalan, pelabuhan/bandara, Kapal/Pesawat kargo (harga terjangkau)
- b. Sumber daya dan Teknologi : Keterbatasan sumber daya dan teknologi dapat menghambat pengembangan baik dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Pasar : Keterbatasan pengetahuan tentang pasar luar negeri.
- d. Jaringan : Keterbatasan jaringan dan kontak di luar negeri.
- e. Bahasa dan budaya : Perbedaan bahasa dan budaya dapat menghambat komunikasi dan kerja sama.
- f. Keuangan: Keterbatasan akses permodalan dan ditambah dengan persyaratan dan prosedur yang berbelit belit.

✚ Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan,

Secara garis besarnya isu-isu penting ini antara lain yaitu

- a. Ketersediaan Data UMKM/IKM
Data UMKM/IKM masih belum tersedia dan up-date
Adapun rekomendasi dan catatan yaitu membangun database UMKM/IKM yang terpadu terintegrasi dan update
- b. Peningkatan daya saing & digitalisasi UMKM/IKM,
UMKM/IKM masih menghadapi kendala permodalan, keterbatasan inovasi produk, pemasaran yang sempit, dan rendahnya kualitas SDM serta Rendahnya tingkat adopsi teknologi produksi dan digitalisasi pemasaran
Rekomendasi dan catatan :

fasilitasi akses pembiayaan inklusif melalui KUR, dana bergulir LPDB, atau skema pembiayaan syariah, inkubasi bisnis dan pelatihan inovasi produk berbasis teknologi serta mendorong digitalisasi pemasaran melalui e-commerce lokal/nasional dan promosi produk unggulan daerah

c. Kelembagaan Koperasi.

Masih banyaknya koperasi yang belum melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang menyebabkan koperasi tidak aktif hal ini disebabkan karena rendahnya partisipasi anggota koperasi

Rekomendasi dan catatan :

Melaksanakan revitaliasi dengan memberikan edukasi ke koperasi sesuai regulasi, memberikan pelatihan manajemen koperasi dan dapat mendorong digitalisasi koperasi antara lain laporan keuangan berbasis IT dan Pelaporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) secara online serta mendorong pembentukan koperasi sektor riil untuk bisa di mitrakan dengan BUMN (Bulog, Id Food, Kimia Farma, Pertamina Patra Niaga dll)

d. Stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok/bahan penting

Fluktuasi harga bahan pokok/bahan penting sering memicu inflasi daerah, distribusi pupuk bersubsidi masih menemui kendala (tidak tepat sasaran, keterlambatan distribusi)

Rekomendasi & catatan :

Memperkuat sistem monitoring pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok/bahan penting melalui koordinasi dengan bulog, distribusi, pelaksanaan operasi pasar serta memperbaiki mekanisme pengawasan distribusi pupuk.

e. Peningkatan mutu produk & standarisasi

Banyak produk UMKM/IKM yang belum memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan sertifikasi halal. serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya standarisasi mutu dan sertifikasi mutu

Rekomendasi dan Catatan :

Perluasan layanan pengujian komoditi terakreditasi (kopi, minyak kelapa, AMDK, beras, rumput laut)., fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi kandungan gizi, dll bagi pelaku UKM/IKM

f. Peningkatan koordinasi dan koordinasi multipihak

Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat/daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya, serta mendorong kemitraan Bussiness Matching antara UMKM/IKM dengan industri besar, e-commerce, dan lembaga keuangan

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis ini untuk tindak lanjutnya menyesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029. RKPD tahun 2026 menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) tahun 2026.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rencana Kerja Pembangunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026 yang dimulai 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Kumperindag berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Diskumperindag periode 2025-2029 yang telah

disusun dan direview atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kumperindag merupakan kebutuhan dan menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan.

Tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 difokuskan pada Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan. Sebagai aktualisasi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan daerah, maka ditetapkanlah program dan kegiatan prioritas OPD dalam RKPD 2025 Rancangan.

Review terhadap rancangan awal RKPD Adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan yang antara lain bertujuan untuk menjaga keterkaitan antara RPJMD → RKPD → Renja OPD → RKA serta Menyelaraskan kebutuhan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak terjadi overbudgeting atau underbudgeting.



Tabel T.C. 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					12.887.761.505	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					12.887.761.505
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					12.887.761.505	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					12.887.761.505
I.1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					12.887.761.505	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					12.887.761.505
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	12.887.761.505	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	12.887.761.505
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20	%	-	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20	%	-
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Provinsi Gorontalo	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	9	%	-	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Provinsi Gorontalo	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	9	%	-
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	20	%	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	20	%	-
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	Provinsi Gorontalo	Persentase Usaha Kecil Informal ke Formal	20	%	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	Provinsi Gorontalo	Persentase Usaha Kecil Informal ke Formal	20	%	-



No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
	DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Pertumbuhan Wirausaha	1,52	%		USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Pertumbuhan Wirausaha	1,52	%	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Provinsi Gorontalo	Proporsi UMKM Naik Kelas	100	%	-	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Provinsi Gorontalo	Proporsi UMKM Naik Kelas	100	%	-
II.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					-	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					-
II.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					-
7	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Provinsi Gorontalo	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	95	%	-	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Provinsi Gorontalo	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	95	%	-
8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Provinsi Gorontalo	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	95	%	-	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Provinsi Gorontalo	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	95	%	-
9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Provinsi Gorontalo	Nilai Ekspor Barang di Provinsi	1035	Juta USD	-	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Provinsi Gorontalo	Nilai Ekspor Barang di Provinsi	1035	Juta USD	-
10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Persentase penanganan pengaduan konsumen	95	%	-	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Persentase penanganan pengaduan konsumen	95	%	-
III.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					-
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Provinsi Gorontalo	Persentase Kab / Kota Yang Difasilitasi dalam penyusunan dokumen pembangunan Industri	16	%	-	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Provinsi Gorontalo	Persentase Kab / Kota Yang Difasilitasi dalam penyusunan dokumen pembangunan Industri	16	%	-



No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)					-	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)					-
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	-
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					-	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					-
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Persentase penanganan pengaduan konsumen	95	%	-	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Persentase penanganan pengaduan konsumen	95	%	-
	Total					12.887.761.505	Total					12.887.761.505

- Analisis kebutuhan menyesuaikan dengan pagu indikatif yang diberikan (belum termasuk belanja program dan kegiatan yang menunjang fungsi OPD).
- Pagu belum termasuk DAK Non Fisik P2KUKM



Hasil perbandingan antara program dan kegiatan dalam RKPD Rancangan Awal 2026 dengan analisis kebutuhan yang tertuang dalam Renja Dinas Kumperindag Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Jumlah program dan kegiatan serta target pada RKPD Rancangan awal dan Renja 2026 adalah 11 program, 18 kegiatan, 28 sub kegiatan.
2. Program kegiatan pada Renja 2026 adalah program kegiatan dalam upaya pencapaian target yang terdapat pada Renstra Tahun 2025-2029 dan telah menyesuaikan dengan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas epmen 050 tahun 2020 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Outcome dan indikator outcome mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029.
4. Terdapat 1 program pada urusan Perindustrian memiliki indikator outcome yang tidak sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan telah disesuaikan dengan kewenangan.
5. Pada RKPD Rancangan Awal 2026 di Tabel Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026 Bab VI, mencantumkan totalan anggaran yang merupakan pagu indikatif rancangan awal RKPD 2026 senilai Rp. 12.887.761.505,- (sesuai Surat Sekretariat Daerah Nomor 050/Bappeda-P2EPD/696/III/2025 tanggal 24 Maret 2025).
6. Adapun untuk Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo belum mencantumkan anggaran per program. Anggaran yang tersedia digunakan untuk mengakomodir belanja wajib mengikat. Analisis kebutuhan mengacu pada pagu indikatif Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2026.

Adapun Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Dinas Kumperindag provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.10

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Dinas Kumperindag provinsi Gorontalo

No.	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					21.852.432.675	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					21.852.432.675
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					20.163.374.825	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					20.163.374.825
I.1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					20.163.374.825	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					20.163.374.825
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	15.019.739.825	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	15.019.739.825
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20	%	32.388.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20	%	32.388.000
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Provinsi Gorontalo	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	9	%	32.388.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Provinsi Gorontalo	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	9	%	32.388.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	20	%	32.388.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	20	%	32.388.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	Provinsi Gorontalo	Persentase Usaha Kecil Informal ke Formal	20	%	4.999.522.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	Provinsi Gorontalo	Persentase Usaha Kecil Informal ke Formal	20	%	4.999.522.000
			Pertumbuhan Wirausaha	1,52	%				Pertumbuhan Wirausaha	1,52	%	



No.	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
	MIKRO (UMKM)						USAHA MIKRO (UMKM)					
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Provinsi Gorontalo	Proporsi UMKM Naik Kelas	100	%	46.949.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Provinsi Gorontalo	Proporsi UMKM Naik Kelas	100	%	46.949.000
II.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1.689.057.850	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1.689.057.850
II.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					424.998.850	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					424.998.850
7	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Provinsi Gorontalo	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	95	%	32.385.500	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Provinsi Gorontalo	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	95	%	32.385.500
8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Provinsi Gorontalo	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	95	%	227.157.750	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Provinsi Gorontalo	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	95	%	227.157.750
9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Provinsi Gorontalo	Nilai Ekspor Barang di Provinsi	1035	Juta USD	32.380.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Provinsi Gorontalo	Nilai Ekspor Barang di Provinsi	1035	Juta USD	32.380.000
10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Persentase penanganan pengaduan konsumen	95	%	133.075.600	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Persentase penanganan pengaduan konsumen	95	%	133.075.600
III.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.264.059.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.264.059.000
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Provinsi Gorontalo	Persentase Kab / Kota Yang Difasilitasi dalam penyusunan dokumen pembangunan Industri	16	%	1.264.059.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Provinsi Gorontalo	Persentase Kab / Kota Yang Difasilitasi dalam penyusunan dokumen pembangunan Industri	16	%	1.264.059.000
	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)					329.462.325	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)					329.462.325



No.	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					232.388.325	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					232.388.325
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					232.388.325	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					232.388.325
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	232.388.325	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	232.388.325
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					97.074.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					97.074.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					97.074.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					97.074.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Persentase penanganan pengaduan konsumen	95	%	97.074.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Persentase penanganan pengaduan konsumen	95	%	97.074.000
	Total					22.181.895.000	Total					22.181.895.000

1. Jumlah program dan kegiatan serta target pada Rancangan Akhir RKPD dan Renja 2026 adalah 11 program, 18 kegiatan, 28 sub kegiatan dan tidak terdapat perbedaan.
2. Pada tahapan finalisasi rancangan akhir RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026 dan sebagai tindak lanjut hasil pembahasan Forum Gabungan OPD, Rakortekrenbang dan Musrenbang Tingkat Provinsi Gorontalo serta program prioritas Tahun 2026 maka terdapat penyesuaian pagu indikatif pada rancangan akhir RKPD Tahun 2026, dimana untuk pagu indikatif Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berjumlah Rp. 22.181.895.000,- dan Hasil analisis kebutuhan Dinas Kumperindag terdiri dari belanja wajib mengikat sebesar Rp 14.143.901.131,- dan belanja program/kegiatan sebesar Rp 8.037.993.869,-
3. Pagu Renja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2026 telah disesuaikan dengan pagu Rancangan Akhir RKPD 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Sehingga untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kumperindag Tahun 2026, maka dilakukan review terhadap Rancangan Akhir RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026 sesuai tabel 2.10 diatas.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka perumusan program dan kegiatan Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2026 mengakomodir hasil rapat koordinasi bidang koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan, pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat, Musrenbang RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025,

Berbagai usulan stakeholder yang disampaikan dalam forum perencanaan Musrenbang Tingkat Provinsi Gorontalo, serta penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses DPR tersebut diolah sesuai nomenklatur yang tersedia dan ketersediaan anggaran untuk kemudian dituangkan kedalam usulan program dan kegiatan Renja 2026.



Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
	[Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi]		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		<i>Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi</i>	25 Dokumen	
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>	25 Unit	Kegiatan ini diusulkan untuk pemeriksaan dan pengawasan Koperasi
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
	[Meningkatkan kualitas SDM perkoperasian]		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	9	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		<i>Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</i>	80 Orang	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	100 Orang	Kegiatan ini diusulkan untuk kegiatan revitalisasi koperasi
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
	[Meningkatkan produktivitas koperasi]		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	17	
				20	
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		<i>Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	20 Unit	
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,</i>	25 Unit	Kegiatan ini diusulkan untuk Monev Koperasi Merah Putih



Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		<i>Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>		
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, "USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)"				
	[Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]		Persentase Usaha Kecil Informal ke Formal	0,43	
				1,52	
			Pertumbuhan Wirausaha	20	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		<i>Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya</i>	800 Unit Usaha	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</i>	500 Unit Usaha	Kegiatan ini diusulkan untuk memberikan stimulan bagi pelaku UMKM di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan</i>	300 Orang	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
	[Meningkatkan daya saing UMKM]		Proporsi UMKM Naik Kelas	0,11	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		<i>Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah</i>	25 Unit Usaha	
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>	25 Unit Usaha	Kegiatan ini diusulkan untuk memberikan stimulan bagi pelaku UMKM di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				



Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	[Meningkatkan kemudahan proses "perizinan dan pendaftaran berusaha]"		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	1	
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		<i>Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</i>	20 Dokumen	
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>	20 Dokumen	Kegiatan ini diusulkan untuk penerbitan Surat Keterangan Asal
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				
	[Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	95	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas "Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan"		<i>Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi "Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan"</i>	0 Laporan	
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i>	4 Laporan	Kegiatan ini diusulkan untuk pemantauan harga dan pemenuhan ketersediaan bahan pokok pangan
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota "dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi"</i>	4 Laporan	Kegiatan ini diusulkan untuk stabilisasi harga dan pemenuhan ketersediaan bahan pokok pangan.
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan "Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya"</i>	4 Laporan	
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>	4 Laporan	Kegiatan ini diusulkan untuk pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi



Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
	[Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor]		Nilai Ekspor Barang di Provinsi	1035	
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) "Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi"		Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	4 Pelaku Usaha	
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	Kegiatan ini diusulkan untuk pelaksanaan misi dagang komoditi ekspor
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
	[Meningkatkan tata niaga dan mutu produk]		Persentase penanganan pengaduan konsumen	15 95	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	160 Kasus	
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Kabupaten/ Kota	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	Kegiatan ini diusulkan untuk dukungan pelaksanaan kegiatan BPSK
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	55 Pelaku Usaha	
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	4 Laporan	Kegiatan ini diusulkan untuk pengawasan barang dan jasa yang beredar
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
	[Meningkatkan realisasi pembangunan industri]		Persentase Kab / Kota penyusunan dokumen pembangunan Industri Persentase Pembangunan Industri Kecil Menengah	14 16 4	



Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		<i>Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	12 Dokumen	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	4 Dokumen	Kegiatan ini diusulkan untuk memberikan bantuan berupa peralatan bagi pelaku IKM Pangan & Furniture
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	4 Dokumen	Kegiatan ini diusulkan untuk memberikan bantuan berupa peralatan bagi pelaku IKM Kerajinan & Perbengkelan
3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	4 Dokumen	
	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)				
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk</i>	215 Dokumen	
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan</i>	215 laporan	Kegiatan ini diusulkan untuk pelayanan pengujian komoditi
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah produk potensial yang dipantau</i>	3 Produk	Kegiatan ini diusulkan untuk pemantauan komoditi
3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan</i>	5 Sertifikat	Kegiatan ini diusulkan pelayanan sertifikasi mutu komoditi

BAB III

TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Kumperindag melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Diskumperindag diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana Rancangan Awal RPJMN 2025 – 2029, Visi pembangunan untuk 5 (lima) tahun adalah *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 yang akan diwujudkan melalui Astha Cita 8 Misi Pembangunan yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari hasil review terhadap RPJPD 2025-2045 dan Rancangan RPJMN 2025-2045, maka ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Gorontalo untuk tahun 2025-2029 yaitu “Gorontalo Maju dan Sejahtera”. Adapun Tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 difokuskan pada *Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan*.

Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berkontribusi dalam pencapaian tujuan pertama yakni Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan akan dicapai melalui 2 strategi yakni menciptakan sumber pertumbuhan baru pada sisi produksi (supply side) yang merata dan meningkatkan sisi permintaan (demand side) didukung oleh sektor rill, eksternal, fiskal, dan keuangan. Untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru pada sisi produksi (supply side) yang merata akan didorong melalui : peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, mendorong pembangunan industri pengolahan untuk mendukung hilirisasi. Selanjutnya untuk meningkatkan sisi permintaan (demand side) didukung oleh sektor rill, eksternal, fiskal, dan keuangan akan didorong melalui potensi unggulan daerah, peningkatan ekspor dan serta mendorong partisipasi swasta.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menjaga stabilitas harga, serta langkah-langkah perluasan/pemerataan untuk mengurangi kesenjangan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah

Kebijakan nasional yang terkait dengan pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-*

growth), memperluas lapangan kerja (*pro-job*), menanggulangi kemiskinan (*pro-poor*) serta merespon persoalan-persoalan perubahan iklim (*pro-environment*).

Aktualisasi dari kebijakan nasional tersebut antara lain :

1. Sasaran pembangunan industri nasional tahun 2026, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, mencakup target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) manufaktur sebesar 6,52% dan target rasio kontribusi manufaktur terhadap PDB sebesar 18,66%. Selain itu, terdapat juga target nilai investasi manufaktur yang akan dicapai, peningkatan produk unggulan dan pengembangan jaringan pemasaran yang terstandarisasi serta prioritas lain seperti pengembangan pariwisata, pemberdayaan kelompok tani dan ternak serta peningkatan fasilitas sarana produksi
2. Sasaran pembangunan perdagangan nasional tahun 2026 difokuskan pada penguatan pasar domestik (berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar domestik, serta meningkatkan daya saing produk lokal), perluasan ekspor (Fokus pada peningkatan volume dan nilai ekspor produk Indonesia ke berbagai negara, termasuk diversifikasi pasar dan produk ekspor), serta peningkatan daya saing produk dalam negeri (Peningkatan kualitas produk, efisiensi produksi, dan penerapan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global), pemberdayaan UMKM (Peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, serta akses pembiayaan, teknologi digital, dan pemasaran produk.) serta untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas, termasuk peningkatan kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara, dan pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan.
3. Sasaran pembangunan koperasi nasional tahun 2026 belum secara eksplisit disebutkan dalam dokumen yang tersedia. Namun, secara umum, pembangunan koperasi di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan daya saing, kesejahteraan anggota, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Sasaran pembangunan koperasi nasional tahun 2026 akan berfokus pada beberapa aspek utama :

- i. Peningkatan kualitas produk dan layanan (Koperasi perlu fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan, terutama produk unggulan daerah)
 - j. Penguatan kelembagaan dan manajemen (Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, termasuk manajemen yang profesional dan transparan, menjadi kunci keberhasilan)
 - k. Pengembangan akses pasar (Memfasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi produk koperasi, baik secara domestik maupun internasional, sangat penting)
 - l. Peningkatan peran koperasi dalam perekonomian (Koperasi diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional, termasuk dalam penyediaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi)
 - m. Pemanfaatan teknologi (Adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek operasional koperasi dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing.)
4. Sasaran pembangunan UMKM nasional tahun 2026 mencakup peningkatan kualitas koperasi (Fokus pada pembinaan dan pengembangan koperasi agar lebih berkualitas dan efektif dalam mendukung perekonomian), meningkatkan pembinaan usaha mikro (melalui peningkatan omzet UMK, diharapkan usaha mikro dapat lebih berkembang dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian), dan peningkatan investasi pada IKM (Mendorong investasi pada Industri Kecil Menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing), meningkatkan kontribusi UMKM (UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja), digitalisasi UMKM (Mendorong UMKM untuk go digital melalui pemanfaatan teknologi dalam pemasaran dan operasional⁰, pengurangan biaya dan kemudahan berbisnis (Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mengurangi biaya operasional dan birokrasi yang menghambat), penguatan iklim investasi (Menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya pada UMKM), promosi dan pemasaran (Mendukung UMKM dalam memasarkan produk mereka secara efektif, baik di pasar domestik maupun internasional).

Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut diatas. maka kebijakan pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Gorontalo diarahkan pada :

1. Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
2. Peningkatan akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha
3. Peningkatan produktivitas melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan
4. Optimalisasi sarana dan prasarana
5. Peningkatan sumber daya manusia
6. Reformasi Regulasi dan Kemudahan Berusaha
7. kolaborasi dan sinergritas lintas sektor (BUMN, Perguruan Tinggi, Swasta)
8. Program UMKM Go Digital, Dukungan Infrastruktur Digital serta layanan digital UMKM
9. Data yang terintegrasi dengan Kab/Kota
10. Fasilitasi Penyusunan RPIK
11. Penetapan regulasi yang mendukung standarisasi produk
12. Pengembangan teknologi produksi dan pelatihan
13. Peningkatan Produk dan Keahlian
14. Stimulasi peningkatan produk IKM
15. Budget sharing dengan instansi terkait
16. Dukungan kemitraan, Kebijakan Pemerintah mendukung Pemasaran Produk
17. Pembentukan tim teknis Pengawasan dan Pengendalian serta Monitoring Evaluasi berkala
18. Pelaksanaan intervensi pasar
19. Peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa
20. Peningkatan edukasi tentang regulasi serta standar produk dan penegakan Hukum
21. Meningkatkan promosi dan kerja sama di bidang ekspor
22. Meningkatkan promosi dan kerja sama sektor perdagangan antar daerah
23. Penyelesaian aduan sengketa konsumen
24. Perencanaan dan Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana
25. Pendidikan dan Pelatihan

26. Sertifikasi dan Akreditasi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaannya, Renstra SKPD Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029 akan menjadi pedoman bagi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan OPD Kabupaten/Kota terkait dalam merumuskan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD.

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029 :

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya kontribusi UMKM, Daya Saing Industri serta Nilai Tambah Perdagangan dalam mendukung Perekonomian Daerah	Persentase Koperasi Sehat	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif
	Persentase Pertumbuhan UMKM	Peningkatan UMKM Naik kelas	Persentase UMKM Naik Kelas
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM	Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah
			Persentase IKM yang difasilitasi stimulan
	Persentase peningkatan nilai tambah sektor perdagangan	Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting
			Persentase peningkatan nilai ekspor
			Persentase penyelesaian pengaduan konsumen
			Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025–2029 dan RPJMD 2025–2029. Nomenklatur program 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan

Rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029, akan tetapi masih terdapat outcome dan indikator outcome yang telah disesuaikan dengan kewenangan.

Sebagai aktualisasi dari Renstra 2025-2029 dan RKPD 2026 maka program dan kegiatan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator kinerja hasil program dan output kegiatan secara langsung mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029.
2. Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam misi RPJMD 2025-2029. meliputi :
 - a. Mengoptimalkan posisi strategis Gorontalo terhadap IKN Nusantara untuk akselerasi pembangunan
 - b. Melakukan akselerasi agar Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia
 - c. Menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
 - d. Mewujudkan infrastruktur dan pelayanan publik yang merata dan berkeadilan
 - e. Menjadikan “adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat.
 - f. Program dan kegiatan Dinas Kumperindag Tahun 2026 merujuk pada RKPD Rancangan Akhir Provinsi Gorontalo Tahun 2026 yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026, dengan tetap mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang disusun bersamaan dengan RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026

3. Rumusan program dan kegiatan Dinas Kumperindag Tahun 2025 memiliki relevansi pencapaian prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam misi RPJMD 2025-2029 Menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung program prioritas pembangunan daerah.
4. Program dan kegiatan pada Dinas Kumperindag merupakan bagian dari pencapaian program unggulan Pembangunan 2025-2029 yang merupakan arahan fokus utama dalam pembangunan daerah tahun RPJMD 2025-2029 yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah yakni penguatan peran UMKM dalam memajukan basis ekonomi masyarakat dan daerah melalui peningkatan kualitas dan produktivitas UMKM yang inklusif dengan pemanfaatan media digital.
5. Sasaran Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan yakni :
 - Meningkatnya Koperasi Aktif
 - Peningkatan UMKM Naik kelas
 - Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM
 - Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

Berikut diuraikan perbandingan program, kegiatan dan anggaran APBD T.A. 2025 dan Renja rancangan akhir Tahun 2026.

Tabel 3.2. Perbandingan Jumlah Program Kegiatan dan Anggaran

URAIAN	JUMLAH			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
APBD T.A. 2025 (sebelum pemanfaatan efisiensi)	11	18	26	22.071.294.305
Renja 2026	11	18	26	22.181.895.000



Tabel 3.3. Perbandingan Program, Kegiatan dan Anggaran RKPD dan Renja 2026

URAIAN	JUMLAH			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
RKPD 2026	11	18	26	22.181.895.000
RENJA 2026	11	18	26	22.181.895.000

Berdasarkan masukan dan pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Program dan Kegiatan Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :



Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027. Provinsi Gorontalo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
		DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			21.852.432.675				31.739.922.930
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			20.163.374.825				23.937.842.930
	2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			20.163.374.825				23.937.842.930
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			15.019.739.825			-	16.324.819.930
		[Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan]	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	15.019.739.825	-	-	-	16.324.819.930
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	10 Dokumen	344.852.000			-	738.100.000
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	187.402.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		435.600.000
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	157.450.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		302.500.000
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan	78 Orang	10.162.381.283			-	11.358.419.930
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	10.089.620.483	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11.267.669.930



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	72.760.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		90.750.000
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan</i>	78 Orang	64.620.000			-	157.300.000
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	78 Orang	64.620.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		157.300.000
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan</i>	17 Paket	1.696.449.520			-	1.227.500.000
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket	1.696.449.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.227.500.000
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	1 Laporan	2.751.437.022			-	2.843.500.000
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	2.751.437.022	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2.843.500.000
2	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			32.388.000			-	310.970.000
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi]	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20	32.388.000	-	-	-	310.970.000



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	25 Dokumen	32.388.000			-	310.970.000
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi							
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	25 Unit	32.388.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		310.970.000
3	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			32.388.000			-	522.753.000
		[Meningkatkan kualitas SDM perkoperasian]	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	9	32.388.000	-	-	-	522.753.000
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	80 Orang	32.388.000			-	522.753.000
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	32.388.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		522.753.000
4	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			32.388.000			-	576.400.000
		[Meningkatkan produktivitas koperasi]	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	17 20	32.388.000	-	-	-	576.400.000
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 Unit	32.388.000			-	576.400.000
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha							



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	25 Unit	32.388.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		576.400.000
5	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			4.999.522.000			-	4.400.000.000
		[Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	Persentase Usaha Kecil Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha	0,43 1,52 20	4.999.522.000	-	-	-	4.400.000.000
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya</i>	800 Unit Usaha	4.999.522.000			-	4.400.000.000
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan							
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</i>	500 Unit Usaha	4.967.178.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2.926.000.000
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan							
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan</i>	300 Orang	32.344.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.474.000.000
6	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			46.949.000			-	1.802.900.000



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
		[Meningkatnya daya saing UMKM]	Proporsi UMKM Naik Kelas	0,11 100	46.949.000	-	-	-	1.802.900.000
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah	25 Unit Usaha	46.949.000			-	1.802.900.000
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi							
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	25 Unit Usaha	46.949.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.802.900.000
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.689.057.850				7.802.080.000
	3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			424.998.850				4.111.580.000
1	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			32.385.500			-	187.550.000
		[Meningkatnya kemudahan proses "perizinan dan pendaftaran berusaha]"	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	1 95	32.385.500	-	-	-	187.550.000
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	20 Dokumen	32.385.500			-	187.550.000
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA							
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	20 Dokumen	32.385.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		187.550.000
2	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			227.157.750			-	2.299.000.000



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	75 95	227.157.750	-	-	-	2.299.000.000
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi "Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0 Laporan	194.773.150			-	2.220.350.000
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota							
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4 Laporan	22.388.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		42.350.000
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota "dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi"	4 Laporan	172.385.150	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2.178.000.000
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan "Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya"	4 Laporan	32.384.600			-	78.650.000
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi							



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
3	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	32.384.600 32.380.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	78.650.000 278.300.000
	3.30.05.1.01	[Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor]	Nilai Ekspor Barang di Provinsi	1035	32.380.000	-	-	-	278.300.000
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	4 Pelaku Usaha	32.380.000			-	278.300.000
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan							
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	32.380.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		278.300.000
4	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			133.075.600			-	1.346.730.000
		[Meningkatkan tata niaga dan mutu produk]	Persentase penanganan pengaduan konsumen	15 95	133.075.600	-	-	-	1.346.730.000
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	160 Kasus	100.688.000			-	1.207.580.000
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen							
			Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	100.688.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.207.580.000
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	55 Pelaku Usaha	32.387.600			-	139.150.000



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>	4 Laporan	32.387.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		139.150.000
	3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.264.059.000				3.690.500.000
1	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			1.264.059.000			-	3.690.500.000
		[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	Persentase Kab / Kota penyusunan dokumen pembangunan Industri Persentase Pembangunan Industri Kecil Menengah	14 16 4	1.264.059.000	-	-	-	3.690.500.000
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	12 Dokumen	1.264.059.000			-	3.690.500.000
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	4 Dokumen	609.283.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.936.000.000
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	4 Dokumen	622.388.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.452.000.000
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri							
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	4 Dokumen	32.388.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		302.500.000
		BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)			329.462.325				659.410.000



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			329.462.325				659.410.000
	3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			329.462.325				659.410.000
1	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			232.388.325			-	150.000.000
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	232.388.325			-	150.000.000
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	232.388.325	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000
2	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			97.074.000			-	509.410.000
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	215 Dokumen	97.074.000			-	509.410.000
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian							
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	215 laporan	48.718.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		314.600.000
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk							
			Jumlah produk potensial yang dipantau	3 Produk	13.680.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		114.950.000
	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi							
			Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	5 Sertifikat	34.676.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		79.860.000
	J U M L A H				22.181.895.000				32.399.332.930

Total Anggaran ini belum termasuk DAK TA. 2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2026

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 menjabarkan rencana kerja program kegiatan dan Pendanaan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang akan didanai pada tahun 2026. Komposisi pendanaan dari Program dan Kegiatan merupakan elaborasi lebih lanjut untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kumperindag provinsi Gorontalo dalam mendukung Visi dan Misi dan tujuan sasaran Pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah disajikan bersama dengan semua parameter yang menyertai, yaitu Indikator, Target Tahun Rencana, Lokasi serta Pagu yang merupakan hasil perumusan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan (sesuai SK Tim Penyusun Renja 2026 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo) untuk kemudian menjadi acuan dalam melaksanakan program kegiatan pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2026. Selanjutnya, rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2026 dapat dicermati pada Tabel sebagai berikut (terlampir) :

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						21.852.432.675,00							31.739.922.930,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.163.374.825,00							23.937.842.930,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						20.163.374.825,00							23.937.842.930,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						15.019.739.825,00						-	16.324.819.930,00	
		[Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan]	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	15.019.739.825,00	-	-	-	-	-	-	16.324.819.930,00	-
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			10 Dokumen	344.852.000,00			-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	-	738.100.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	187.402.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan		435.600.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	157.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan		302.500.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	-			78 Orang	10.162.381.283,00			-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	-	11.358.419.930,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/ Bulan	10.089.620.483,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan		11.267.669.930,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	72.760.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan		90.750.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-			78 Orang	64.620.000,00			-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	-	157.300.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				78 Orang	64.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan		157.300.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	-			17 Paket	1.696.449.520,00			-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	-	1.227.500.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	1.696.449.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan		1.227.500.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	-			1 Laporan	2.751.437.022,00			-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	-	2.843.500.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.751.437.022,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan		2.843.500.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						32.388.000,00						-	310.970.000,00	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi]	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	32 34	0 16	16	20	32.388.000,00	-	-	-	-	-	-	310.970.000,00	-
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi</i>	-			25 Dokumen	32.388.000,00			-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Koperasi	-	310.970.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>				25 Unit Usaha	32.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Koperasi		310.970.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						32.388.000,00						-	522.753.000,00	
		[Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian]	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	17	0	7	9	32.388.000,00	-	-	-	-	-	-	522.753.000,00	-
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</i>	-			80 Orang	32.388.000,00			-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Koperasi	-	522.753.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				100 Orang	32.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Koperasi		522.753.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						32.388.000,00						-	576.400.000,00	
		[Meningkatnya produktivitas koperasi]	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	21 24	0 18	16 19	17 20	32.388.000,00	-	-	-	-	-	-	576.400.000,00	-
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	-			20 Unit Usaha	32.388.000,00			-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Koperasi	-	576.400.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>				25 Unit Usaha	32.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Koperasi		576.400.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						4.999.522.000,00						-	4.400.000.000,00	
		[Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha	1.1 2,1 43	0	0,04 0.23 100	0.43 1,52 20	4.999.522.000,00	-	-	-	-	-	-	4.400.000.000,00	-
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya</i>	-			800 Unit Usaha	4.999.522.000,00			-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha/UMKM	-	4.400.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				500 Unit Usaha	4.967.178.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha/UMKM		2.926.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				300 Orang	32.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha/UMKM		1.474.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						46.949.000,00						-	1.802.900.000,00	
		[Meningkatnya daya saing UMKM]	Proporsi UMKM Naik Kelas	0.17 100	0 0,28	0.03 100	0.11 100	46.949.000,00	-	-	-	-	-	-	1.802.900.000,00	-
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah	-			25 Unit Usaha	46.949.000,00			-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha/UMKM	-	1.802.900.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				25 Unit Usaha	46.949.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha/UMKM		1.802.900.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.689.057.850,00							7.802.080.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						424.998.850,00							4.111.580.000,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						32.385.500,00						-	187.550.000,00	
		[Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha]	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	1 95	0 1	1 95	1 95	32.385.500,00	-	-	-	-	-	-	187.550.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	-			20 Dokumen	32.385.500,00			-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha/Eksportir	-	187.550.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				20 Dokumen	32.385.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha/Eksportir		187.550.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						227.157.750,00						-	2.299.000.000,00	
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	80 95	0	75 95	75 95	227.157.750,00	-	-	-	-	-	-	2.299.000.000,00	-
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-			0 Laporan	194.773.150,00			-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha dan Konsumen	-	2.220.350.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				4 Laporan	22.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha dan Konsumen		42.350.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				4 Laporan	172.385.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha dan Konsumen		2.178.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-			4 Laporan	32.384.600,00			-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Distributor, Pengecer Pupuk, Petani	-	78.650.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				4 Laporan	32.384.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Distributor, Pengecer Pupuk, Petani		78.650.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						32.380.000,00						-	278.300.000,00	
		[Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor]	Nilai Ekspor Barang di Proviinsi	1573 1717	847	932	1035	32.380.000,00	-	-	-	-	-	-	278.300.000,00	-
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-			4 Pelaku Usaha	32.380.000,00			-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	-	-	278.300.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				5 Pelaku Usaha	32.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	-		278.300.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						133.075.600,00						-	1.346.730.000,00	
		[Meningkatnya tata niaga dan mutu produk]	Persentase penanganan pengaduan konsumen	35 95	0	10 95	15 95	133.075.600,00	-	-	-	-	-	-	1.346.730.000,00	-
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	-			160 Kasus	100.688.000,00			-	-	Pelaku Usaha dan Konsumen	-	1.207.580.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif</i>				3 BPSK	100.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pelaku Usaha dan Konsumen		1.207.580.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi</i>	-			55 Pelaku Usaha	32.387.600,00			-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha dan Konsumen	-	139.150.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>				4 Laporan	32.387.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha dan Konsumen		139.150.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.264.059.000,00							3.690.500.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						1.264.059.000,00						-	3.690.500.000,00	
		[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	Persentase Kab / Kota Yang Difasilitasi dalam penyusunan dokumen pembangunan Industri Persentase Pembangunan Industri Kecil Menengah	12 16 22	0 10	12 16 2	14 16 4	1.264.059.000,00	-	-	-	-	-	-	3.690.500.000,00	-
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	-			12 Dokumen	1.264.059.000,00			-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha/IKM	-	3.690.500.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>				4 Dokumen	609.283.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha/IKM		1.936.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				4 Dokumen	622.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha/IKM		1.452.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				4 Dokumen	32.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha/IKM		302.500.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)						329.462.325,00							659.410.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						329.462.325,00							659.410.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						329.462.325,00							659.410.000,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						232.388.325,00						-	150.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	232.388.325,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-			1 Laporan	232.388.325,00			-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	-	150.000.000,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	232.388.325,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang		150.000.000,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
2.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						97.074.000,00						-	509.410.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	-			215 Dokumen	97.074.000,00			-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	-	-	509.410.000,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				215 laporan	48.718.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	-		314.600.000,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk														
			Jumlah produk potensial yang dipantau				3 Produk	13.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	-		114.950.000,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi														
			Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan				5 Sertifikat	34.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Produktivi tas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	-		79.860.000,00	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	J U M L A H							22.181.895.000,00							32.399.332.930,00	

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2026 dan telah diselaraskan dengan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kumperindag 2025-2029 yang ditetapkan mendahului penetapan Renstra Perangkat Daerah sehingga jika terdapat hal-hal yang belum sesuai secara substantif maka akan ditinjau dan dilakukan penyesuaian kembali pada Renja Perubahan Tahun 2026.

Program kegiatan pada Dokumen perencanaan Renja mendukung tujuan pembangunan daerah dan visi "Gorontalo Maju dan Sejahtera" yang merupakan landasan pembangunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo 2025 – 2045. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang berlaku sedari Tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Untuk tahun 2026, Rencana Kerja Dinas Kumperindag provinsi Gorontalo terdiri dari 11 program, 18 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan pagu indikatif pada tahapan Rancangan Akhir RKPD sebesar Rp. 22.181.895.000,- (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Anggaran Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja ini sifatnya masih indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya masih dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi pembiayaan/ anggaran ataupun keuangan daerah yang tersedia. Rencana Kerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo akan semakin berat. Di satu sisi, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan dan dibenahi. Sedangkan disisi lain ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sangat terbatas, baik SDM, sarana prasarana dan ditambah lagi Keterbatasan anggaran yang tersedia di Tahun Anggaran 2026 yang

dapat berdampak pencapaian indikator tidak semaksimal yang diharapkan dan belum dapat menjawab permasalahan-permasalahan secara bertahap di tahun 2026 ini.

Menghadapi situasi tersebut, maka perlu dikembangkan langkah-langkah strategis guna mengatasi berbagai permasalahan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, yang juga sekaligus bisa menutupi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga roda pembangunan tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain :

1. Ketersediaan Data UKM/IKM sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan usaha para pelaku usaha, serta pemantauan dan evaluasi program. Selain itu, data juga penting untuk meningkatkan daya saing UMKM/IKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program, kegiatan dan anggaran OPD dengan Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dengan sinergi tersebut akan tercipta efisiensi sumberdaya namun tetap memiliki daya dorong yang kuat terhadap peningkatan kinerja sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan di daerah.
3. Mendorong partisipasi dan peran aktif sektor swasta dan BUMN dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang disesuaikan dengan lingkup aktifitas dengan proporsi yang berimbang, sehingga partisipasi tersebut disamping meringankan tugas dan tanggungjawab OPD, juga akan meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku usaha dan masyarakat.
4. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan instansi vertikal terkait perbankan, asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga donor, dan organisasi lainnya dalam rangka pemberdayaan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan di daerah.
5. Penyempurnaan organisasi, revitalisasi program dan kegiatan serta indikasi anggaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo harus senantiasa diselaraskan dengan dinamika terkini dan proyeksi perkembangan pembangunan selang waktu 2025-2029
6. Ketersediaan anggaran yang optimal dalam upaya pencapaian target kinerja Renstra Tahun 2025-2029 dan Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Kumperindag Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Rancangan renja yang telah disusun disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dan harus selaras dengan RPJMD, RKPD dan Renstra 2025-2029 Perangkat Daerah serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi;
2. Penyusunan renja dilakukan secara partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat melalui forum konsultasi publik dan forum perangkat daerah serta dapat mengakomodir usulan musrembang ;
3. Renja Perangkat daerah berorientasi hasil (outcome-oriented) yang memuat program, kegiatan sub kegiatan yang jelas, target kinerja (output dan outcome) yang terukur serta indikator kinerja yang sesuai dengan indikator pada Renstra PD dan RKPD
4. Efisiensi dan Efektivitas, dengan memastikan penggunaan anggaran berbasis kinerja dengan prinsip efisien (meminimalkan biaya untuk hasil yang optimal) dan efektif mencapai sasaran pembangunan sesuai target
5. Pendanaan renja harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pagu indikatif yang ditetapkan TAP dan program/kegiatan strategis

Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang disusun dan dilaksanakan akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala yang mencakup monitoring pelaksanaan program dan kegiatan, evaluasi capaian kinerja tahunan dan menjadi input penyusunan renja tahun berikutnya.

Semoga Dokumen Renja ini bisa menjadi pedoman dalam perencanaan. pelaksanaan. monitoring evaluasi serta sarana sinkronisasi program pusat, provinsi, kabupaten/kota sekaligus menjadi alat ukur pencapaian kinerja Tahun 2026 dan jika ada perubahan maka akan ditinjau dan dilakukan penyesuaian kembali pada Renja Perubahan Tahun 2026

Gorontalo, Agustus 2025
KEPALA DINAS



RISION SUNGE

Pembina Utama Madya
NIP. 19690924198902 1 001